



# UNIVERSITAS YAPIS PAPUA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)

Alamat : J. DR. Sam Ratulangi No. 11 Dok V Atas Tlp. (0967) 534012, 550355. Faks (0967) 537985 Jayapura-Papua

### NOTA TUGAS

Nomor : 056/G-004/LP2M- UNİYAP/XI/2019

Dalam rangka peranan lembaga pendidikan dibidang penelitian dan pengabdian sebagai bagian integral kegiatan akademik sebagai manifestasi Tri Darma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Yapis Papua, dengan ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Yapis Papua Jayapura menugaskan kepada :

No	Nama	NIDN	Program Studi	Jabatan
1.	Dr. Andri Irawan, S.E.,M.Si 1	1224047701	Manajemen	Ketua
2.	Dr. Muhdi B.Hi Ibrahim, S.E.,M.M	1221026201	Manajemen	Anggota
3.	Dr. Entar Sutisman, S.E.,M.Ak	1227037701	Akuntansi	Anggota
4.	Dr. Abdul Rasyid, S.E.,M.Si	1208106601	Manajemen	Anggota
5.	Irwana Adam Labo, S.E.,M.Si	1410067901	Manajemen	Anggota
5.	Yaya Sonjaya, S.E.,M.Si	1208047201	Akuntansi	Anggota

Dengan melibatkan partisipasi mahasiswa dengan nama – nama mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama	NPM	Program Studi	Jabatan
1.	Steven Wamo	17110212	Manajemen	Anggota
2.	Almalika Firgandhini Kadri	17111002	Manajemen	Anggota
3.	Putri Auliya	17111137	Manajemen	Anggota

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "**Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Mimika**" yang dilaksanakan selama 1 (Satu) Tahun dimulai sejak bulan November 2019 sd Oktober 2020 yang berlokasi di Kabupaten Mimika.

Demikian Nota Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jayapura, 05 November 2019

An. Kepala

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
(LP2M) Uniyap Jayapura



**MUH ALDRIN AKBAR, S.E., M.M**

Sekretaris

Tembusan Kepada Yth:

1. Rektor UNİYAP (sebagai laporan) di Jayapura;
2. Wakil Rektor I dan II UNİYAP di Jayapura;
3. Arsip

# RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN  
MIMIKA**

# KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Kabupaten Mimika Tahun 2019–2024 berisi tentang rencana strategis dan rekomendasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah terkait dengan isu–isu strategis global, nasional dan regional seperti penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta isu strategis lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional telah mewajibkan semua Pemerintah Daerah agar menyusun Rencana Aksi Daerah untuk Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (RAD-P2SEDT) dan Rencana Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB). Untuk itu, dokumen Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) di Kabupaten Mimika Tahun 2019–2024 diharapkan menjadi referensi dan rekomendasi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) tersebut sehingga arah kebijakan umum pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menjadi tepat sasaran, efektif dan efisien serta mengedepankan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, koordinasi dan sinkronisasi.

Dan akhir kata, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini.

**Bappeda Kabupaten Mimika  
Plh. Kepala,**

**Drs. Marthen Paiding, S.T.,M.Si**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	4
<b>BAB II. METODE DAN MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI (RPPE)</b> .....	<b>6</b>
2.1. Pengertian .....	6
2.2. Tahapan Penyusunan RPPE .....	7
2.3. Waktu dan Pelaksanaan .....	8
<b>BAB III. MATERI RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI (RPPE) KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019</b> .....	<b>9</b>
3.1. Gambaran Umum .....	9
3.2. Kriteria dan Indikator Percepatan Pembangunan Ekonomi .....	13
3.2.1. Kriteria Ekonomi .....	14
3.2.2. Kriteria Sumber Daya Manusia .....	21
3.2.3. Kriteria Sarana dan Prasarana .....	26
3.2.4. Kemampuan dan Pengelolaan Keuangan Daerah .....	34
3.3. Isu Strategis dan Prioritas Percepatan Pembangunan Ekonomi .....	38
3.3.1. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin .....	38
3.3.2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi .....	40
3.3.3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia .....	41
3.4. POTENSI EKONOMI (NON PERTAMBANGAN) DI KABUPATEN MIMIKA .....	45
3.4.1. Pertanian .....	46
3.4.2. Peternakan .....	49
3.4.3. Perikanan dan Kelautan .....	52
3.5. Sasaran Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) .....	55
3.5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan .....	57
3.5.2. Rencana Program Dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Ekonomi .....	65
<b>BAB IV ANALISIS CAPAIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b> .....	<b>70</b>
5.1. PENDANAAN .....	74
5.2. Pelaksanaan .....	75
5.3. Pengawasan dan Evaluasi .....	76
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>77</b>

Gambar 2. 1 Bahan Penyusunan RPPE Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023...	7
Gambar 3.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Mimika .....	9
Gambar 3. 2 Luas Wilayah menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2017...11	
Gambar 3. 3 Presentasi Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.....	14
Gambar 3. 4 Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2017	16
Gambar 3. 5 Laju Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika .....	17
Gambar 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mimika .....	20
Gambar 3. 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5 Kabupaten/Kota Teratas Tahun 2017-2018 .....	23
Gambar 3. 8 Laju Pertumbuhan IPM Menurut Kab/Kota di Provinsi Papua .....	24
Gambar 3. 9 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Mimika .....	25
Gambar 3. 10 Proporsi Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2018 .....	28
Gambar 3. 11 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan .....	29
Gambar 3. 12 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk .....	30
Gambar 3. 13 Persentasi Jalan Kabupaten Mimika dalam Keadaan Baik (>40Km/Jam).....	30
Gambar 3. 14 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik .....	31
Gambar 3. 15 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mimika .....	32
Gambar 3. 16 Rasio Puskesmas dan Pustu di Kabupaten Mimika .....	32
Gambar 3. 17 Rasio Poliklinik di Kabupaten Mimika.....	33
Gambar 3. 18 Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Mimika .....	33
Gambar 3. 19 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk .....	34

Tabel 2. 1 Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPPE.....	8
Tabel 3. 1 Luas Wilayah menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2017.....	10
Tabel 3. 2 Luas Wilayah Menurut Ketinggian Di Kabupaten Mimika Tahun 2017 .....	11
Tabel 3. 3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mimika .....	12
Tabel 3. 4 Kriteria dan Indikator Percepatan Pembangunan ekonomi .....	13
Tabel 3. 5 Garis Kemiskinan dan Presentasi Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika Tahun 2013-2017 .....	16
Tabel 3. 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua .....	21
Tabel 3. 7 Indikator Pembentukan IPM Kabupaten Mimika .....	22
Tabel 3. 8 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru PAUD (KB, TK) di Kabupaten Mimika 2016.....	26
Tabel 3. 9 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD (Umum dan Madrasah Ibtidaiyah) di Kabupaten Mimika 2016.....	27
Tabel 3. 10 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SMP (Umum dan Madrasah Tsanawiyah) di Kabupaten Mimika 2016 .....	27
Tabel 3. 11 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SMA (Umum, SMK dan Madrasah Aliyah) di Kabupaten Mimika 2016 .....	27
Tabel 3. 12 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 .	35
Tabel 3. 13 Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 .....	37
Tabel 3. 14 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018.....	37
Tabel 3. 15 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018.....	37
Tabel 3. 16 Luas Panen dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Mimika Tahun 2013-2017 .....	46
Tabel 3. 17 Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar dan Ubi Kayu Per Distrik Tahun 2018.....	47
Tabel 3. 18 Luas Panen dan Produksi Rata-rata Produksi Talas dan Keladi Per Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2018 .....	48
Tabel 3. 19 Data Jumlah Peternak Per Desa/Kelurahan dan Distrik Tahun 2018 .....	49
Tabel 3. 20 Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Mimika .....	51
Tabel 3. 21 Data Produksi Perikanan Tangkap Di Kabupaten Mimika Tahun 2014 - 2018.....	53
Tabel 3. 22 Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015-2018.....	53
Tabel 3. 23 Rekapitan Komoditi Olahan yang Keluar Tahun 2018 .....	54
Tabel 3. 24 Rekapitan Komoditi Udang dan Kepiting yang Keluar.....	54
Tabel 3. 25 Isu Strategis dan Sasaran RPPE di Kabupaten Mimika .....	55
Tabel 3. 26 Strategi dan Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Di Kabupaten Mimika .....	57
Tabel 3. 27 Program dan Kegiatan Pada Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi .....	66

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan dalam aspek ekonomi, sosial, infrastruktur dan aspek lainnya. Meskipun saat ini pembangunan masih dipandang belum sepenuhnya berhasil atau merata, dalam artian masih terdapat kesenjangan diantara daerah-daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terbukti dengan masih banyaknya penetapan status daerah tertinggal di beberapa wilayah dan sebagian besar wilayah tersebut berada di Indonesia bagian timur. Meskipun demikian, upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan diberbagai aspek terus dilakukan guna menurunkan angka kesenjangan pembangunan diberbagai daerah, mulai dari pembangunan ekonomi, sosial maupun infrastruktur.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan yang merupakan isu strategis nasional maupun internasional.

Selain itu, isu strategis potensi ekonomi Kabupaten Mimika tanpa kontribusi sektor pertambangan sebenarnya sangat baik hal ini dibuktikan dengan adanya sektor-sektor ekonomi baru yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika seperti sektor perikanan, pertanian, perdagangan dan jasa maupun sektor lainnya. Meskipun belum memberikan kontribusi sebesar pertambangan namun hal

ini perlu ditingkatkan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika dan menjadi kegiatan ekonomi lainnya untuk menjadi perhatian investasi prioritas selain pertambangan sehingga Kabupaten Mimika mempunyai sektor-sektor ekonomi baru yang dapat diandalkan untuk melaksanakan program-program percepatan pembangunan ekonomi dan tetap menjadi Kawasan Prioritas Investasi (KPI) di Indonesia Timur.

## **1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan berbagai pihak (*stakeholder*) baik pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta yang mempunyai tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi dengan wilayah lain serta membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan ekonomi baru serta mencapai tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Mimika. Selanjutnya, tujuan penyusunan Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi dasar dan panduan pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Mimika agar lebih terarah guna menjamin pemerataan pembangunan daerah melalui seluruh aspek baik sosial, ekonomi maupun infrastruktur;
- b. Sebagai dasar penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di setiap tahapan pelaksanaan pada tahun berjalan;
- c. Sebagai penguatan sistem dan komitmen bersama antara Lembaga Pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kota dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi;
- d. Menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) khususnya pada aspek percepatan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk

mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.

Pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RT-RPJMN) 2020-2024 sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat sebesar 5,4 – 6,0 persen/tahun;
- b. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar  $3,0 \pm 1$  persen sepanjang tahun 2020 – 2024;
- c. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 6,5 sampai 7,0 persen dan 4,0 sampai 4,6 persen pada tahun 2024.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian, hilirasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar  $3,0 \pm 1$  persen sepanjang 2020–2024. Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada Jawa dan Sumatera. Wilayah di luar Jawa dan Sumatera seperti Papua dan Papua Barat diperkirakan sudah dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Aspek lain pembangunan

ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan disusunnya Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi maka diharapkan Kabupaten Mimika mempunyai kerangka konseptual untuk diimplementasikan pada setiap kebijakan serta program kerja yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

### **1.3. Dasar Hukum**

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan RPPE Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 dan perubahannya tentang Otonomi Khusus Papua;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
5. Peraturan Presdiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031.

## **BAB II. METODE DAN MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI (RPPE)**

### **2.1. Pengertian**

Dalam laporan Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE), terdapat penggunaan beberapa pengertian atau istilah sebagai berikut:

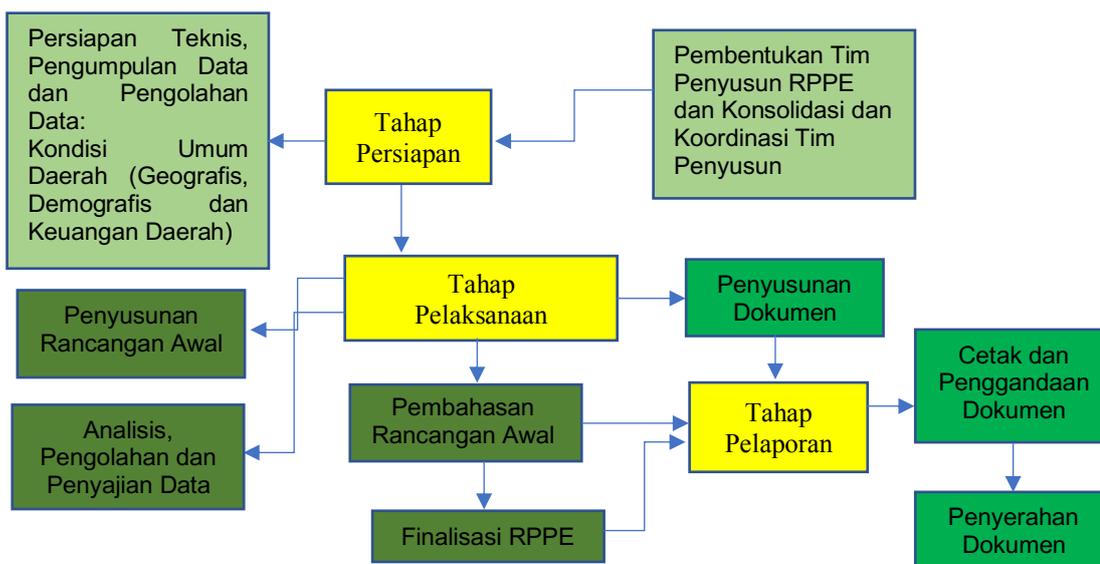
- a. Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (**RPPE**) adalah pola perencanaan pemerintah dalam mempercepat realisasi pembangunan ekonomi;
- b. Pembangunan Berkelanjutan (**PB**) adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 1 ayat 3 UU No.32 Tahun 2009);
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (**RPJM**) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJP dan RPJMN (UU No 23 Tahun 2014);
- d. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (**RAD-TPB**) adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan

terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Perpres 59 Tahun 2017).

## 2.2. Tahapan Penyusunan RPPE

Tahapan penyusunan dokumen Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Kabupaten Mimika Tahun 2019-2024 dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap persiapan yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan serta pelaporan. Metode penelitian pada penyusunan dokumen ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan data yang dianalisis adalah data sekunder yang bertujuan untuk menjelaskan serta menggambarkan kondisi, hubungan maupun pengaruh dari variable/kriteria serta indikator yang telah ditetapkan.

Diharapkan hasil penelitian dan penyusunan dokumen ini dapat menjadi referensi dan rekomendasi untuk menetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) di Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023. Tahapan penyusunan RPPE Kabupaten Mimika sebagaimana yang digambarkan berikut ini.



Gambar 2. 1 Bahan Penyusunan RPPE Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023

### 2.3. Waktu dan Pelaksanaan

Penyusunan RPPE Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023 dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu 1) persiapan, 2) pelaksanaan, dan 3) pelaporan. Dimana pada masing-masing tahapan terdapat kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Tabel 2. 1 Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPPE

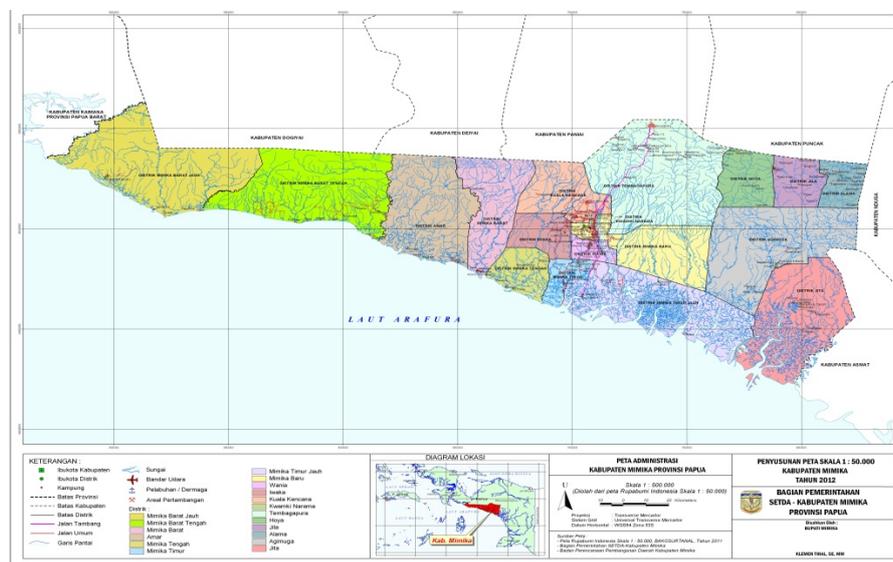
No	KEGIATAN	WAKTU (Bulan/Minggu)																			
		AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Tahapan Persiapan</b>																				
1	Penyusunan/ Penetapan Tim																				
2	Konsolidasi dan Koordinasi Tim Penyusun																				
3	Persiapan Teknis, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data																				
<b>B</b>	<b>Tahapan Pelaksanaan</b>																				
1	Penyusunan Rancangan Awal Dokumen RPPE																				
2	Analisis, Pengolahan dan Penyajian Data																				
3	Pembahasan Rancangan Awal Dokumen RPPE																				
4	Finalisasi Dokumen RPPE																				
<b>C</b>	<b>Tahapan Pelaporan</b>																				
1	Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan																				
2	Cetak / Penggandaan Dokumen RPPE																				
3	Penyerahan Dokumen RPPE																				

# BAB III. MATERI RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI (RPPE) KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019

## 3.1. Gambaran Umum

Kabupaten Mimika merupakan satu dari 29 kabupaten/kota yang berada di provinsi Papua yang terletak antara 134°31' - 138°31' bujur timur (BT) dan 4°60' - 5°18' lintang selatan (LS). Memiliki luas wilayah 21.693,50 Km<sup>2</sup> atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniaia dan Puncak
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Arafura
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Nduga dan Asmat
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat.



Gambar 3.1 Batas Wilayah Aministrasi Kabupaten Mimika

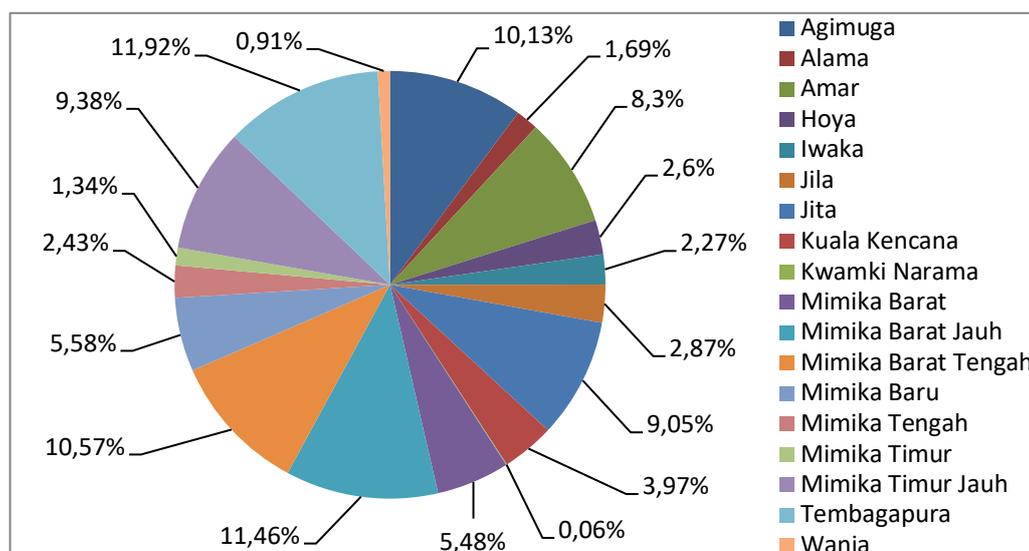
Kabupaten ini memiliki 18 Distrik/Kecamatan yaitu Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Amar, Mimika Barat Tengah,

Mimika Barat Jauh, Jita, Agimuga, Jila, Alama, Hoya dan Tembagapura sebagaimana yang disajikan pada table 3.1. Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika yang memiliki wilayah terluas adalah Distrik Tembagapura yang memiliki luas wilayah 2.605,95 Km<sup>2</sup> atau 11,92% sementara yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Distrik Kwamki Narama yaitu sebesar 12,34 Km<sup>2</sup> atau 0,06% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Mimika sebagaimana yang disajikan pada gambar 3.2.

Tabel 3. 1 Luas Wilayah menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2017

No.	Distrik	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Agimuga	2.198,56	10,13
2	Alama	415,81	1,69
3	Amar	1801,50	8,30
4	Hoya	563,78	2,60
5	Iwaka	485,67	2,27
6	Jila	572,93	2,87
7	Jita	1962,23	9,05
8	Kuala Kencana	860,19	3,97
9	Kwamki Narama	12,34	0,06
10	Mimika Barat	1.187,85	5,48
11	Mimika Barat Jauh	2.485,89	11,46
12	Mimika Barat Tengah	2.292,46	10,57
13	Mimika Baru	1.237,77	5,58
14	Mimika Tengah	517,77	2,43
15	Mimika Timur	280,64	1,34
16	Mimika Timur Jauh	2.006,67	9,38
17	Tembagapura	2.605,95	11,92
18	Wania	205,50	0,91
<b>Jumlah</b>		<b>21.693,50</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031



Gambar 3. 2 Luas Wilayah menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2017

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031

Topografi yang dimiliki oleh Kabupaten Mimika antara lain terdapat dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga dan Jila. Sementara itu distrik lainnya sebanyak 15 distrik bertopografi dataran rendah. Terdapat 3 distrik yang tidak memiliki pantai yaitu Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura dan Jila. Sedangkan sebagian besar distrik lainnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik tersebut memiliki pantai.

Tabel 3. 2 Luas Wilayah Menurut Ketinggian Di Kabupaten Mimika Tahun 2017

No	Kelas Ketinggian	Luas Wilayah (Ha)	Presentase (%)
1	0-2	138.0461,08	6,31
2	2-5	114.135,93	63,62
3	5-15	250.284,86	6,22
4	15-25	134.996,22	5,26
5	25-40	153.078,83	7,05
6	>40	136.394,00	11,53
<b>Jumlah</b>		<b>2.169.350,92</b>	<b>100</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031

Jumlah penduduk kabupaten Mimika pada tahun 2017 adalah sebesar 210.413 jiwa (Tabel 3.3) dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Mimika baru sebanyak 105.388 jiwa dan jumlah

penduduk paling sedikit terdapat di Distrik Agimuga sebanyak 972 jiwa. Laju pertumbuhann penduduk di kabupaten Mimika tahun 2017 terhadap 2010 sebesar 16,67%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk Mimika tahun 2017 terhadap 2015 adalah 4,33%.

Tabel 3. 3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mimika

Distrik	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan	
	2010	2015	2017	2010-2017	2015-2017
Agimuga	831	930	972	16,97	4,52
Amar	1.671	1.891	1.973	18,07	4,34
Alama	1.579	1.733	1.806	14,38	4,21
Hoya	1.118	1.214	1.267	13,33	4,37
Iwaka	6.343	6.940	7.232	14,02	4,21
Jila	1.111	1.208	1.255	12,96	3,89
Jita	1.373	1.521	1.587	15,59	4,34
Kuala Kencana	15.154	16.575	17.268	13,95	4,18
Kwamki Narama	6.316	6.920	7.200	14,00	4,05
Mimika Barat	2.316	2.507	2.616	12,95	4,35
Mimika Barat Jauh	1.812	1.985	2.069	14,18	4,23
Mimika Barat Tengah	2.063	2.215	2.300	11,49	3,84
Mimika Baru	91.737	100.957	105.388	15,34	4,39
Mimika Tengah	3.060	3.311	3.443	12,52	3,99
Mimika Timur	6.544	7.166	7.471	14,17	4,26
Mimika Timur Jauh	3.023	3.367	3.520	16,44	4,54
Tembagapura	17.003	18.448	19.262	13,29	4,41
Wania	20.801	22.789	23.784	14,34	4,37
<b>Mimika</b>	<b>183.855</b>	<b>201.677</b>	<b>210.413</b>	<b>14,67</b>	<b>4,33</b>

Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Mimika

Secara rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika adalah sebesar 9,57 jiwa/Km<sup>2</sup> yang berarti rata-rata untuk setiap 1 Km<sup>2</sup> wilayah Kabupaten Mimika ditempati oleh 10 orang penduduk. Distrik Kwamki Narama menjadi wilayah terpadat di Kabupaten Mimika dengan kepadatan penduduk 600 jiwa per Km<sup>2</sup>. Sebaliknya Distrik Agimuga menjadi distrik dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 4 penduduk per sepuluh Km<sup>2</sup>.

### 3.2. Kriteria dan Indikator Percepatan Pembangunan Ekonomi

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 telah menetapkan bahwa dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) perlu adanya penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mempunyai 17 tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2030. Dengan demikian, diharapkan penyusunan rencana percepatan pembangunan ekonomi ini dapat mendukung Rencana Aksi Daerah terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB). Adapun tujuan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah;
- b. Mengentaskan kemiskinan;
- c. Mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar serta sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi;
- d. Meningkatkan dan mempercepat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- e. Menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan pembangunan ekonomi.

Kriteria dan indikator percepatan pembangunan ekonomi digolongkan dalam 4 (empat) kriteria dan 19 (sembilan belas) indikator sesuai dengan data yang tersedia, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 4 Kriteria dan Indikator Percepatan Pembangunan ekonomi**

No.	KRITERIA	INDIKATOR
1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase penduduk miskin</li><li>- Garis Kemiskinan</li><li>- Potensi ekonomi</li><li>- Tingkat pengangguran terbuka</li></ul>
2	Sumber Daya Manusia (IPM)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Angka harapan hidup</li><li>- Rata-rata lama sekolah</li><li>- Angka melek huruf</li><li>- Angka partisipasi sekolah</li></ul>

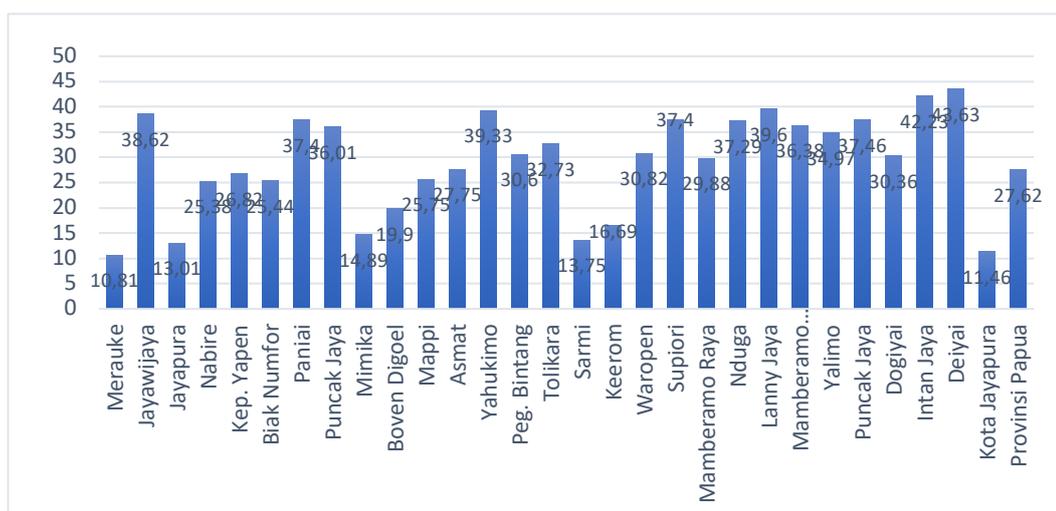
No.	KRITERIA	INDIKATOR
		- Pengeluaran per kapita
3	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sekolah, siswa dan guru</li> <li>- Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik</li> <li>- Jumlah kendaraan menurut jenis</li> <li>- Rasio Panjang jalan</li> <li>- Presentasi jalan kondisi baik (&gt; 40km/jam)</li> <li>- Persentase rumah tangga pengguna listrik</li> <li>- Jumlah tenaga kesehatan</li> <li>- Rasio RS, Puskesmas dan Pustu</li> <li>- Rasio dokter</li> </ul>
4	Kemampuan keuangan daerah	- Kemampuan keuangan daerah

Sumber : Diolah, Tahun 2019

Berikut ini dapat dilihat hasil analisa 4 (empat) kriteria dan indikator percepatan pembangunan ekonomi dari Kabupaten Mimika.

### 3.2.1. Kriteria Ekonomi

Jika dilihat dari kriteria ekonomi, memang bukanlah menjadi penghambat utama untuk percepatan pembangunan ekonomi. Namun, hal ini tetap harus menjadi perhatian utama di Kabupaten Mimika. Dengan melihat 2 (dua) indikator kriteria ekonomi yaitu persentase penduduk miskin dan pengeluaran konsumsi perkapita.



Gambar 3. 3 Presentasi Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Sumber : Papua Dalam Angka Tahun 2018, BPS Papua

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Mimika (14,89) sebenarnya berada di bawah persentase Provinsi Papua (27,62), namun bukan berada pada tingkat terendah di Provinsi Papua (berada pada urutan/peringkat keempat terendah) untuk itu perlu upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Mimika.

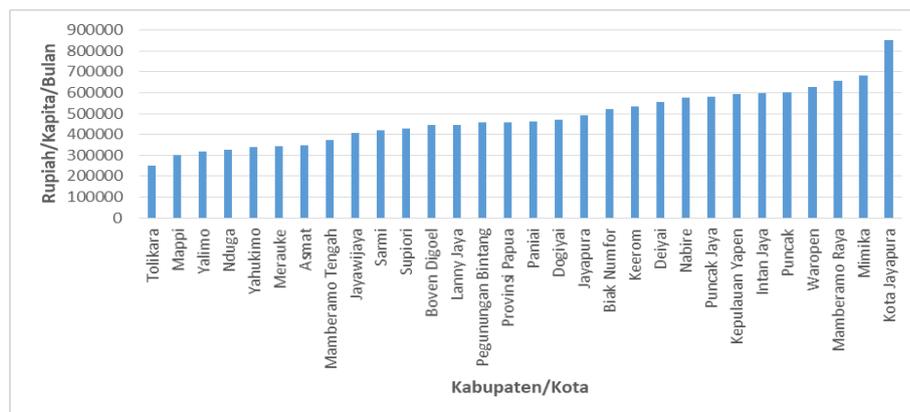
Besar kecilnya penduduk miskin di suatu daerah dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), dimana garis kemiskinan adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan bahan makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). GK terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Seiring dengan kenaikan harga (inflasi) yang terjadi dari tahun ke tahun, besarnya GK juga mengalami peningkatan. Garis kemiskinan di Kabuapten Mimika mengalami penurunan dan kenaikan disepanjang tahun 2013-2017. Pada tahun 2013, GK mencapai Rp. 510.154,- per kapita/bulan dengan penduduk miskin 40,2 ribu jiwa dengan tingkat presentasi 20,73. GK kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi Rp. 535.342,- per kapita/bulan dengan jumlah kemiskinan 32,22 ribu jiwa dan tingkat presentasi 16,11. Selanjutnya pada tahun 2015, GK kembali menunjukkan peningkatan yang cukup besar yaitu Rp. 597.620,- per kapita/bulan, namun presentasi penduduk miskin meningkat menjadi 16,20%. Tahun 2016, GK meningkat menjadi Rp. 634.370,- per kapita/bulan dengan penduduk miskin yang turun menjadi 30,12 ribu jiwa dan presentasi penduduk miskin yang turun menjadi 14,72 ribu jiwa. Selanjutnya pada tahun 2017, GK meningkat Rp. 684.282,- perkapita/bulan dan penduduk miskin yang meningkat menjadi 31,15 ribu jiwa dengan presentasi 14,89.

Tabel 3. 5 Garis Kemiskinan dan Presentasi Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika Tahun 2013-2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Penduduk Miskin (jiwa)	
		Jumlah	Presentasi (%)
2013	510.154	40,2	20,73
2014	535.342	32,22	16,11
2015	597.620	32,85	16,20
2016	634.370	30,12	14,72
2017	684.282	31,15	14,89

Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Mimika

Sisi lain dari kemiskinan, selain jumlah dan persentase penduduk miskin yang juga perlu mendapat perhatian adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan terkait kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Dari gambar berikut ini, terlihat bahwa Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Mamberamo Tengah memiliki garis kemiskinan yang tinggi.

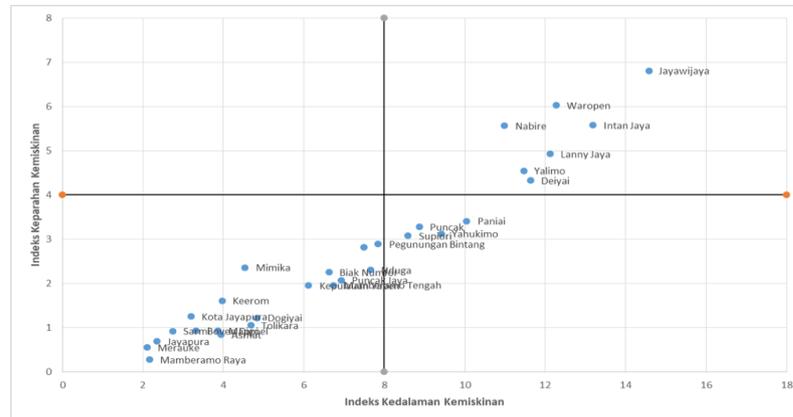


Gambar 3. 4 Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2017

Sumber : Papua Dalam Angka Tahun 2018, BPS Papua

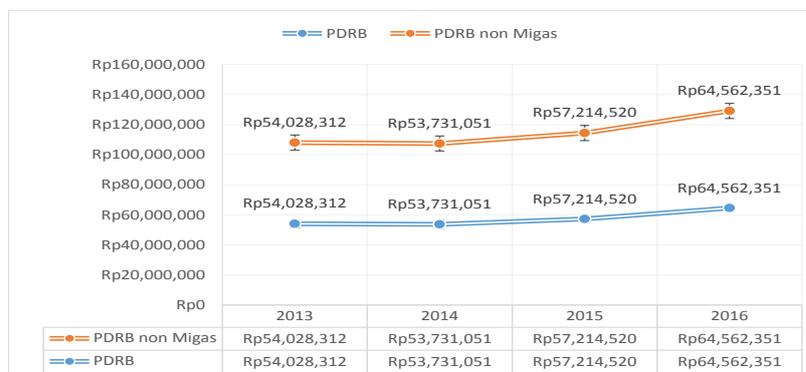
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Gambar 3. 5 Kuadran tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Papua berdasarkan Kabupaten/Kota  
 Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Papua, 2019

Dari gambar di atas terlihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Papua masih tergolong rendah seperti Mamberamo Raya, Merauke, Jayapura, Asmat, Kota Jayapura, Tolikara, Mimika, Biak, Puncak Jaya, Keerom, Sarmi, Dogiai. Daerah-daerah ini perlu perhatian khusus dalam penanggulangan tingkat kemiskinan agar berpindah ke kuadran I (tingkat yang lebih baik). Sehingga diharapkan Mimika dapat menjadi daerah yang mempunyai persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Papua dan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yaitu zero poverty (tidak terdapat kemiskinan) pada tahun 2030.



Gambar 3. 6 Laju Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika

Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Mimika

Berdasarkan gambar 3.6, dapat dilihat bahwa perekonomian Kabupaten Mimika mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya, namun peningkatan ini terkesan sangat lambat dan hal tersebut dipertegas dengan angka kemiskinan yang masih jauh dari target penurunan angka kemiskinan Nasional. Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika disebabkan oleh kondisi geografis Mimika yang belum dimanfaatkan secara optimal yang berakibat pada tingginya biaya transportasi. Tingginya biaya transportasi ini tidak hanya terjadi antar distrik di kabupaten Mimika sendiri, tetapi juga yang akan ke Kabupaten Mimika dari dalam maupun luar Provinsi Papua. Hal ini berakibat pada minimnya penanaman modal ataupun investasi di Kabupaten Mimika terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya (selain tambang) yang belum dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada tabel 3.6 berikut dapat dilihat bahwa sektor selain pertambangan menunjukkan pertumbuhan atau kenaikan setiap tahun, walaupun angka kenaikannya tidak terlalu besar sehingga terkesan pertumbuhannya lambat, namun hal ini membuktikan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan kontribusinya. Terutama untuk sektor primer yang saling terkait dan menjadi pendukung untuk pertumbuhan sektor sekunder dan tersier. Misalnya sektor primer pertanian, kehutanan dan perikanan apabila meningkat nilai kontribusinya, maka sektor sekundernya seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum juga akan meningkat.

Tabel 3. 6 Kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Mimika  
Tahun 2011-2016

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>Primer</b>					
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	987.966,6	1.031.709,0	1.073.555,7	1.226.129,1	1.375.921,6
B	Pertambangan dan Penggalian	43.233.565,3	45.114.705,2	42.564.884,8	45.381.171,8	58.983.075,4
	<b>Sekunder</b>					
C	Industri Pengolahan	79.583,5	82.744,9	86.438,0	95.960,8	108.429,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.524,3	5.837,9	6.695,5	8.607,9	9.865,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.678,2	5.965,9	6.037,2	6.266,0	6.513,9
F	Konstruksi	1.041.924,6	1.170.440,8	1.332.788,4	1.602.856,7	1.938.749,7
	<b>Tersier</b>					
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.065.552,6	1.180.250,0	1.299.986,6	1.499.862,8	1.735.881,3
H	Transportasi dan Pergudangan	586.759,0	642.619,0	715.219,5	838.662,3	966.366,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128.320,2	143.408,2	162.021,1	182.904,3	205.429,5
J	Informasi dan Komunikasi	915.198,5	980.362,9	1.036.558,1	1.161.678,0	1.279.124,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	239.953,4	273.350,1	295.877,6	306.837,9	330.581,6
L	Real Estate	309.491,6	349.222,7	380.652,6	436.507,0	500.993,1
M, N	Jasa Perusahaan	246.533,4	255.855,6	268.170,9	283.674,4	305.348,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	695.635,6	710.260,3	756.717,1	908.868,1	1.095.845,5
P	Jasa Pendidikan	96.173,8	102.611,8	109.236,9	118.270,5	128.660,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	74.881,4	82.324,9	91.957,8	106.449,3	125.530,5
R,S, T,U	Jasa lainnya	110.535,1	122.220,0	141.219,8	157.955,5	177.005,7
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>49.824.277,1</b>	<b>52.253.889,2</b>	<b>50.328.017,5</b>	<b>54.322.662,3</b>	<b>69.273.322,8</b>

Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Mimika

Selain itu, lemahnya daya saing dan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Mimika ikut memberikan kontribusi pada lambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika. Rendahnya daya saing tenaga kerja dan juga produktifitasnya berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mimika sebagaimana data berikut ini.



Gambar 3. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mimika  
*Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Mimika*

Berdasarkan data pada gambar di atas, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Mimika terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 sebesar 6.029 jiwa kemudian turun pada tahun 2014 menjadi 3.930 jiwa pada tahun 2014 dan mengalami kenaikan signifikan menjadi 7.508 jiwa pada tahun 2015 dan angka ini terus meningkat di tahun 2017 menjadi 7.674 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Mimika diakibatkan oleh terus bertambahnya populasi penduduk dan juga penduduk dengan usia angkatan kerja namun tidak diikuti oleh bertambahnya lapangan kerja sehingga terjadi kesenjangan antara penawaran pekerjaan dengan permintaan para pencari kerja. Selain itu, lemahnya daya saing terkait dengan kualitas sumber daya manusia juga menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka, hal ini juga diperparah dengan rendahnya angka partisipasi sekolah dan angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Mimika.

### 3.2.2. Kriteria Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor penentu keberhasilan pembangunan, isu tentang sumber daya manusia selalu menjadi isu global dimana perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia sampai dengan saat ini terus menjadi perhatian dan prioritas dalam semua tujuan pembangunan daerah.

Pada kriteria sumber daya manusia, Kabupaten Mimika sebenarnya telah memiliki angka IPM yang cukup tinggi diantara kabupaten lainnya, namun tidak menempati peringkat tertinggi (peringkat kedua) dalam pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tabel berikut ini dapat dilihat indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Papua pada tahun 2014 sampai 2018.

Tabel 3. 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua

Kabupaten	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Intan Jaya	43,51	44,35	44,82	44,68	46,55
Deiyai	48,12	48,28	48,5	49,07	49,55
Nduga	25,38	25,47	26,56	27,87	29,42
Puncak	38,05	39,41	39,96	41,06	41,81
Pegunungan Bintang	39,68	40,91	41,9	43,24	44,22
Yalimo	44,21	44,32	44,95	46,19	47,13
Puncak Jaya	44,32	44,87	45,49	46,57	47,39
Mamberamo Tengah	43,19	43,55	44,15	45,5	46,41
Yahukimo	46,36	46,63	47,13	47,95	48,51
Lanny Jaya	43,28	44,18	45,16	46,49	47,34
Talikara	46,16	46,38	47,11	47,89	48,85
Asmat	45,91	46,62	47,31	48,49	49,37
Mamberamo Raya	47,88	48,29	49	50,25	51,24
Dogiyai	52,25	52,78	53,32	54,04	54,44
Jayawijaya	53,37	54,18	54,96	55,99	56,82
Paniai	53,93	54,2	54,34	54,91	55,83
Mappi	55,74	56,11	56,54	57,1	57,72
Boven Digoel	58,21	59,02	59,35	60,14	60,83
Sarmi	60,48	60,99	61,27	62,31	63

Kabupaten	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Supiori	59,7	60,09	60,59	61,23	61,84
Waropen	61,97	62,36	63,1	64,08	64,8
Keerom	62,73	63,43	64,1	64,99	65,75
Yapen Waropen	64,89	65,28	65,55	66,07	67
Nabire	66,25	66,49	66,64	67,11	67,7
Merauke	67,33	67,75	68,09	68,64	69,38
Jayapura	69,55	70,04	70,5	70,97	71,25
Mimika	70,4	70,89	71,64	72,42	73,15
Biak Numfor	70,32	70,85	71,13	71,56	71,96
Kota Jayapura	77,86	78,05	78,56	79,23	79,58
<b>Papua</b>	<b>56,75</b>	<b>57,25</b>	<b>58,05</b>	<b>59,09</b>	<b>60,06</b>

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2019, BPS Provinsi Papua

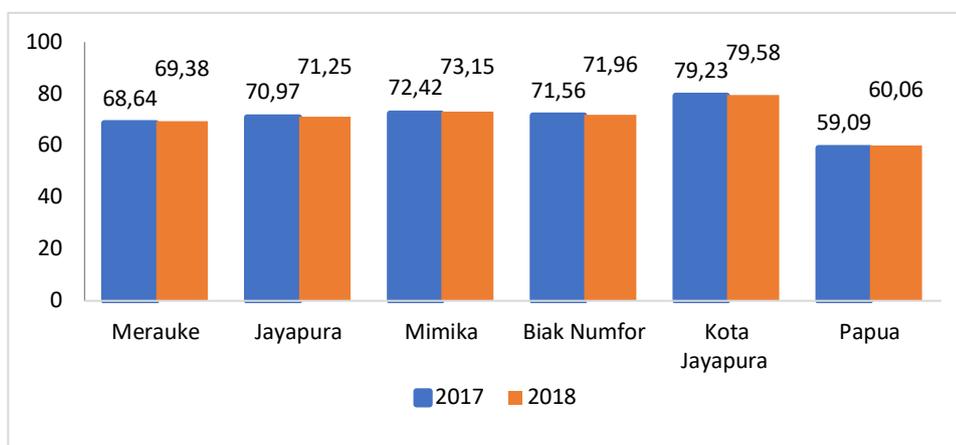
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kabupaten Mimika berada pada posisi tertinggi ke-2 setelah kota Jayapura yaitu 72,42 pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 73,15 di tahun 2018. Pembangunan Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) dan Indeks Daya beli (Daya Beli). Berdasarkan tabel 3.7, ketiga indikator pembentuk IPM tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun Indeks Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan Indeks Daya beli (Daya Beli) yang masih tergolong rendah.

Tabel 3. 8 Indikator Pembentukan IPM Kabupaten Mimika

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	71,85	71,87	71,89	71,90	71,93
Rata-rata Lama Sekolah	8,83	9,31	9,38	9,53	9,54
Harapan Lama Sekolah	10,26	10,49	10,79	11,11	11,48
Pengeluaran per kapita (juta) per tahun	10.849	10.873	10.952	11.169	11.259

Sumber: Mimika Dalam Angka 2018, BPS Mimika

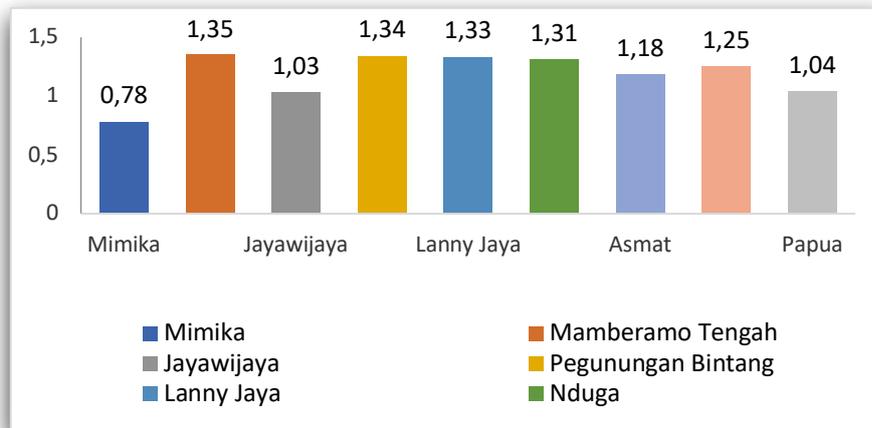
Pada gambar 3.8 berikut, dapat dilihat 5 kabupaten/kota yang memiliki IPM tertinggi di atas rata-rata Provinsi Papua 59,09 pada tahun 2017 dan 60,06 pada tahun 2018. Meskipun IPM Kabupaten Mimika berada pada posisi kedua dan unggul dari kabupaten lainnya bahkan melampaui IPM Provinsi yang berada pada angka 60,06, namun peningkatan IPM Kabupaten Mimika cenderung melambat jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan IPM di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Papua.



Gambar 3. 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5 Kabupaten/Kota Teratas Tahun 2017-2018

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2019, BPS Provinsi Papua

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dua indikator pembentuk IPM yaitu Pendidikan (Harapan lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan Indeks Daya beli (Daya Beli) yang masih tergolong rendah sehingga menyebabkan pertumbuhannya menjadi lambat. Kabupaten Mimika hanya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,78 persen jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Papua sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut ini.

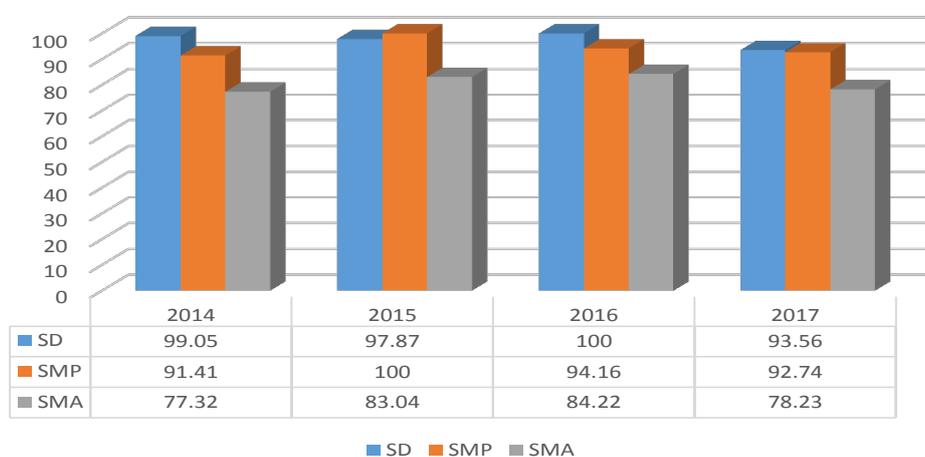


Gambar 3. 9 Laju Pertumbuhan IPM Menurut Kab/Kota di Provinsi Papua  
 Sumber : Papua Dalam Angka Tahun 2019, BPS Provinsi Papua

Pada gambar 3.9 di atas, terlihat bahwa kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi adalah Mamberamo Tengah sebesar 1,35 persen. Sedangkan laju pertumbuhan IPM Kabupaten Mimika adalah yang paling lambat dengan nilai rata-rata 0,78 persen dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya. Bahkan laju pertumbuhan Kabupaten Mimika berada di bawah laju pertumbuhan rata-rata Provinsi Papua yaitu sebesar 1,04 persen. Laju pertumbuhan IPM yang lambat ini dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana lainnya yang tentunya harus menjadi perhatian semua pihak. Dengan melambatnya laju pertumbuhan IPM di Kabupaten Mimika maka akan berdampak juga pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika untuk itu pemerintah kabupaten Mimika tentunya dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada faktor-faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika.

Laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang dapat menjadi penilaian tentang keseriusan kepala daerah menangani permasalahan serta isu strategis tentang pembangunan sumber daya manusianya. Lambatnya laju pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) seringkali disebabkan oleh permasalahan maupun hambatan-hambatan seperti keterlibatan

masyarakat dan lemahnya sistim pendidikan serta rendahnya angka partisipasi sekolah. Keterlibatan masyarakat baik secara mandiri maupun melalui Mitra Pembangunan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Mimika, melalui program-program yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan pengembangan sumber daya manusia. Mitra Pembangunan dan LSM dapat menyelaraskan atau melengkapi program/kegiatan yang belum terakomodir pada Pemerintah Daerah.



Gambar 3. 10 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Mimika

Sumber: *Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Mimika*

Berdasarkan data pada gambar 3.10 di atas, terlihat bahwa angka partisipasi sekolah di Kabupaten Mimika di semua jenjang sekolah (SD, SMP dan SMA) terus mengalami penurunan. Penurunan angka tersebut tentu berpengaruh pada turunya jumlah lulusan di semua jenjang Pendidikan, terutama ditingkat SMA yang berpengaruh terhadap kurangnya lulusan SMA yang diterima ditingkat Perguruan Tinggi dan juga mengurangi jumlah partisipasi lulusan di dunia kerja (lapangan kerja) maupun penciptaan lapangan kerja lainnya. Kurangnya angka partisipasi sekolah seringkali disebabkan oleh tidak meratanya rasio guru dan murid ataupun rasio persebaran guru di suatu daerah, untuk itu perlu menjadi perhatian bahwa persebaran dan juga rasio guru diharapkan jangan hanya terpusat

di perkotaan, pemerintah Kabupaten Mimika perlu melakukan kebijakan dan program-program terkait dengan penempatan guru di wilayah-wilayah yang belum mempunyai rasio yang memadai untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jenjang.

Faktor lain yang harus menjadi perhatian adalah Pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat sebagai upaya memberikan pemahaman dan juga keterampilan terhadap masyarakat tentang bagaimana mengembangkan potensi ekonomi lokal sehingga secara bertahap akan merubah pola pikir masyarakat tentang pemenuhan kebutuhan dasar dan juga pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang (future oriented).

### 3.2.3. Kriteria Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Pendidikan di Kabupaten Mimika untuk tingkat PAUD, SD dan SMP tersebar kurang merata di semua distrik, sebagian besar sarana Pendidikan tersebar di distrik Kuala Kencana dan Mimika Baru. Sedangkan setingkat SMA hanya ada di distrik Iwaka, Mimika Barat, Mimika Baru dan Wania. Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah dan sebaran sekolah untuk semua tingkatan di Kabupaten Mimika.

Tabel 3. 9 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru PAUD (KB, TK) di Kabupaten Mimika 2016

Distrik	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru
Agimuga	-	-	-	-
Amar	-	-	-	-
Alama	-	-	-	-
Hoya	-	-	-	-
Iwaka	1	35	3	11,67
Jila	-	-	-	-
Jita	-	-	-	-
Kuala Kencana	5	368	5	73,60
Kwamki Narama	2	155	9	17,22
Mimika Barat	1	92	4	23,00
Mimika Barat Jauh	-	-	-	-
Mimika Barat Tengah	-	-	-	-
Mimika Baru	27	2.628	204	12,88
Mimika Tengah	1	105	2	52,50
Mimika Timur	3	129	11	11,73
Mimika Timur Jauh	-	-	-	-
Tembagapura	1	105	10	10,50
Wania	5	213	18	11,83

Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Mimika

Tabel 3. 10 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD (Umum dan Madrasah Ibtidaiyah) di Kabupaten Mimika 2016

Distrik	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru
Agimuga	4	585	23	25,43
Amar	2	382	16	23,88
Alama	1	308	2	154
Hoya	1	336	7	48
Iwaka	7	1.313	81	16,21
Jila	2	626	10	62,6
Jita	3	492	20	24,6
Kuala Kencana	10	3.324	178	18,67
Kwamki Narama	3	1.192	22	54,18
Mimika Barat	2	564	20	28,2
Mimika Barat Jauh	6	652	35	18,63
Mimika Barat Tengah	8	174	57	3,05
Mimika Baru	48	16.501	954	17,30
Mimika Tengah	5	969	39	24,85
Mimika Timur	9	1.810	122	14,84
Mimika Timur Jauh	4	712	31	22,97
Tembagapura	6	1.570	59	22,61
Wania	8	3.558	202	17,61

Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Mimika

Tabel 3. 11 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SMP (Umum dan Madrasah Tsanawiyah) di Kabupaten Mimika 2016

Distrik	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru
Agimuga	1	39	5	7,8
Amar	1	115	5	23
Alama	-	-	-	-
Hoya	-	-	-	-
Iwaka	2	402	43	9,35
Jila	1	91	8	11,38
Jita	1	89	12	7,42
Kuala Kencana	5	49	6	8,17
Kwamki Narama	-	-	-	-
Mimika Barat	1	347	12	28,92
Mimika Barat Jauh	2	208	14	14,86
Mimika Barat Tengah	2	298	19	15,68
Mimika Baru	26	7.422	602	12,33
Mimika Tengah	1	123	9	13,67
Mimika Timur	3	487	46	10,59
Mimika Timur Jauh	2	126	16	7,88
Tembagapura	3	380	30	12,67
Wania	3	464	48	9,67

Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Mimika

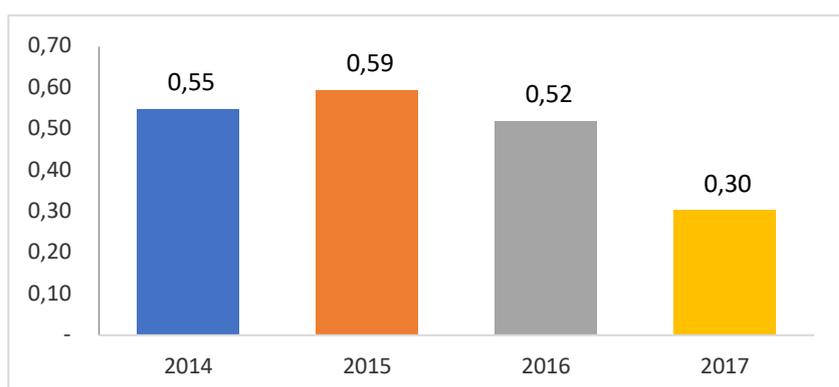
Tabel 3. 12 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SMA (Umum, SMK dan Madrasah Aliyah) di Kabupaten Mimika 2016

Distrik	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru
Agimuga	-	-	-	-
Amar	-	-	-	-
Alama	-	-	-	-
Hoya	-	-	-	-
Iwaka	1	269	25	10,76

Distrik	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru
Jila	-	-	-	-
Jita	-	-	-	-
Kuala Kencana	1	928	73	12,71
Kwamki Narama	1	27	16	1,67
Mimika Barat	1	38	26	1,46
Mimika Barat Jauh	-	-	-	-
Mimika Barat Tengah	-	-	-	-
Mimika Baru	23	5.038	261	19,30
Mimika Tengah	4	335	100	3,35
Mimika Timur	-	-	-	-
Mimika Timur Jauh	-	-	-	-
Tembagapura	-	-	-	-
Wania	9	1.037	183	5,67

Sumber: *Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Mimika*

Aspek sarana dan prasarana berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah, terutama pada bidang infrastruktur, kesehatan, ekonomi dan kesehatan yang merupakan sektor-sektor utama dalam tujuan pembangunan. Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017. Dengan demikian, sektor – sektor tersebut harus menjadi perhatian dan prioritas utama bagi pemerintah Kabupaten Mimika terutama pada indikator – indikator sarana dan prasarana pendukung percepatan pembangunan ekonomi seperti kondisi jalan, fasilitas Pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya. Berikut adalah data sarana dan prasaran di Kabupaten Mimika.



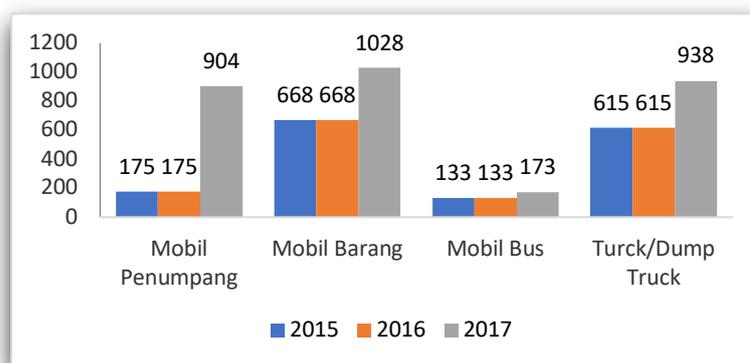
Gambar 3. 11 Proporsi Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2018

Sumber : *Diolah, Tahun 2019*

Dari gambar 3.11 di atas, dapat dilihat bahwa proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Mimika mengalami penurunan yang

sangat signifikan terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2017. Dimana pada tahun 2014 sebesar 0,55 kemudian meningkat menjadi 0,59 pada tahun 2015 dan 2016 dan selanjutnya berada pada 0,30 di tahun 2017, artinya bahwa terjadi penambahan jaringan jalan namun kondisi jalan yang baik mengalami penurunan.

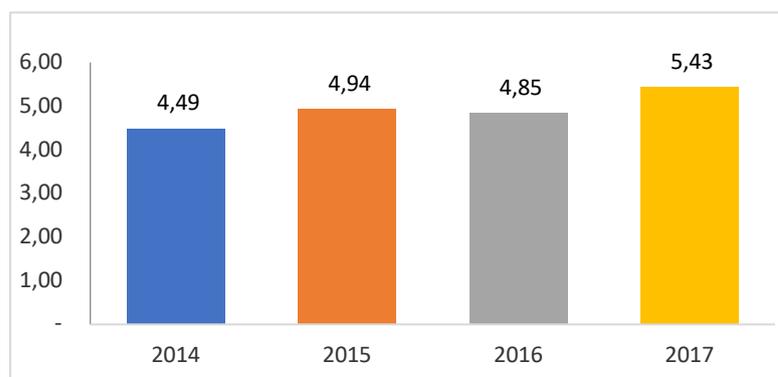
Dengan demikian peningkatan jaringan jalan perlu mendapat perhatian sehingga dapat mendukung aksesibilitas dan konektivitas ekonomi di Kabupaten Mimika. Menurunnya kualitas jalan di Kabupaten Mimika disebabkan oleh bertambahnya volume kendaraan dengan beban yang bervariasi setiap tahunnya, namun tidak diikuti dengan peningkatan kualitas jalan sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 12 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan  
*Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Mimika*

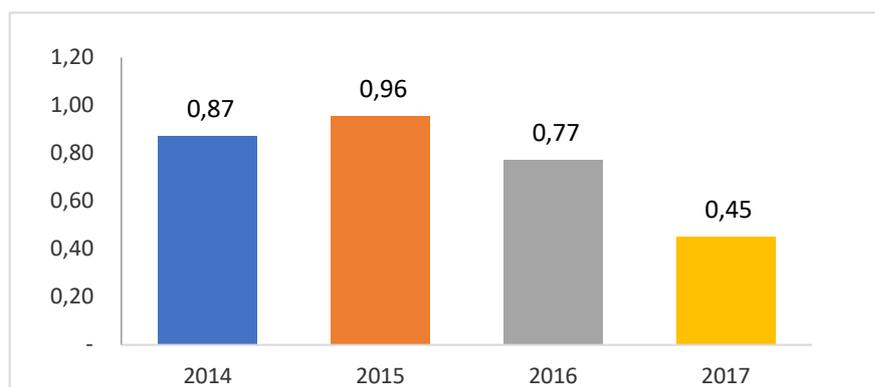
Pada gambar 3.12 di atas, terlihat bahwa jumlah dan jenis kendaraan yang melintasi jalan di Kabupaten Mimika terus meningkat setiap tahunnya yang berdampak pada menurunnya kualitas jalan. Dapat dilihat dari pertumbuhan kendaraan dengan tonase besar seperti truk cukup tinggi dari tahun 2015-2017. Maka pengaturan rute kendaraan sesuai dengan fungsinya penting untuk menjadi perhatian disesuaikan dengan peningkatan jumlah kendaraan. Sehingga peningkatan kualitas jalan disesuaikan dengan fungsi dari jalan yang sudah ditetapkan di Kabupaten

Mimika guna meningkatkan kelancaran aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah di Kabupaten Mimika.



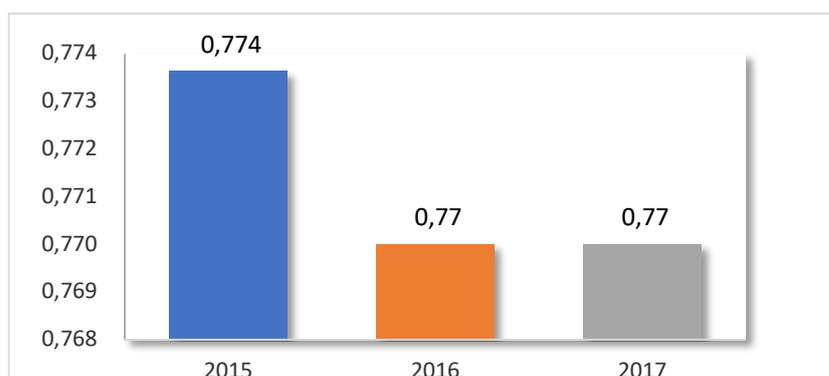
Gambar 3. 13 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk  
*Sumber : Diolah, Tahun 2019*

Sementara itu jika melihat gambar 3.13 dapat dijelaskan bahwa rasio panjang jalan di Kabupaten Mimika telah memadai, hal ini terbukti dengan meningkatnya rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dimana pada tahun 2014 sebesar 4,49 kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 4,94 dan menurun di tahun 2016 menjadi 4,85. Kemudian meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 5,43. Namun hal tersebut tidak didukung dengan persentasi kondisi jalan yang baik yang dapat dilalui dengan kecepatan di atas 40 km/jam sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut ini.



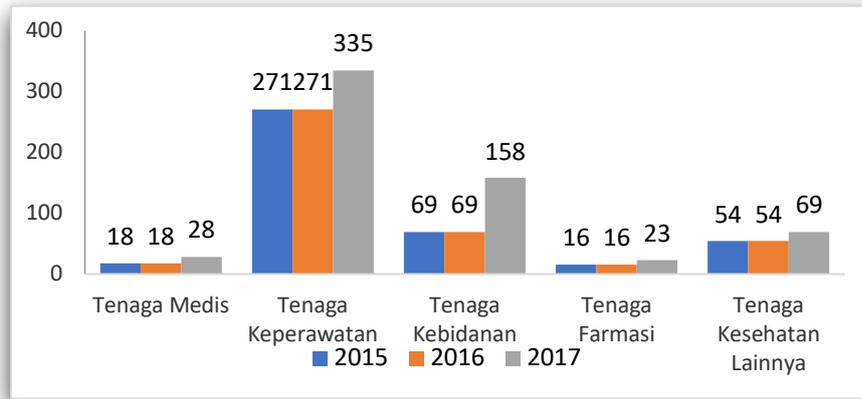
Gambar 3. 14 Persentasi Jalan Kabupaten Mimika dalam Keadaan Baik (>40Km/Jam)  
*Sumber : Diolah, Tahun 2019*

Persentase jalan dalam kondisi baik yang dapat dilalui dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam di Kabupaten Mimika mengalami penurunan seiring dengan penambahan jaringan jalan dan juga jumlah penduduk dimana pada tahun 2014 sebesar 0,87 kemudian meningkat menjadi 0,96 pada tahun 2015 dan selanjutnya menurun pada tahun 2016 hingga 2017 menjadi 0,45. Penurunan presentasi jalan kabupaten Mimika ini menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten Mimika harus memprioritaskan peningkatan jalan agar aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Mimika semakin membaik dan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi.



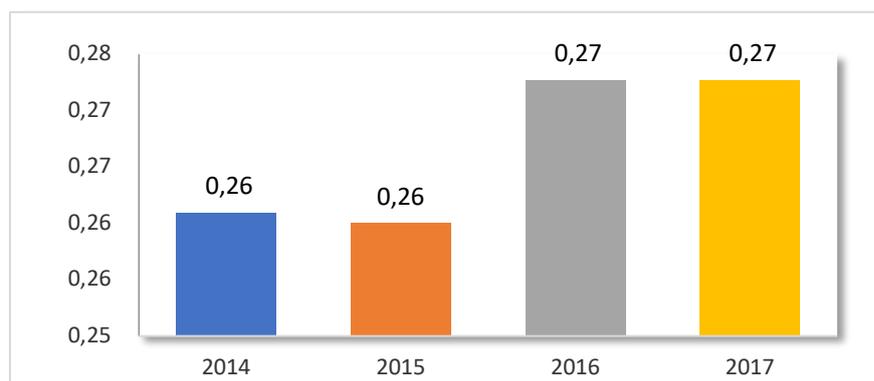
Gambar 3. 15 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik  
*Sumber : Diolah, Tahun 2019*

Pada gambar 3.15 di atas, dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik cenderung tidak mengalami kenaikan. Sejak mengalami penurunan di tahun 2016 pada angka 0,77 tetap bertahan hingga tahun 2017. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Mimika dan menjadi prioritas utama agar rumah tangga pengguna listrik terus meningkat. Dengan harapan jika seluruh wilayah di Kabupaten Mimika telah memiliki jaringan listrik, maka dapat mendukung aktifitas ekonomi pada skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun industri rumah tangga (*home industry*) yang menggunakan listrik sebagai sumber daya.

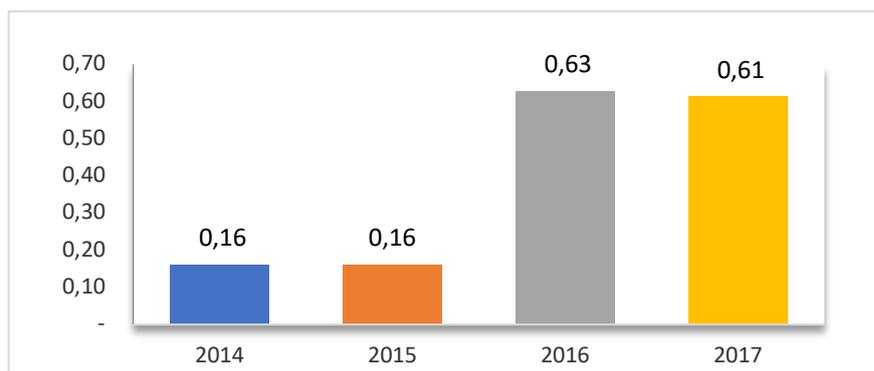


Gambar 3. 16 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mimika  
 Sumber: *Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Mimika*

Berdasarkan data pada gambar 3.16 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika pada tahun 2017 terdiri dari 28 tenaga medis, 335 tenaga keperawatan, 23 tenaga kefarmasian, 158 tenaga kebidanan dan 69 tenaga kesehatan lainnya. Berdasarkan data tersebut, tenaga bidan dan keperawatan mengalami peningkatan, namun belum terdapat peningkatan secara signifikan mengenai tenaga medis dan farmasi di Kabupaten Mimika sehingga perlu mendapat perhatian serius. Terutama pada peningkatan jumlah tenaga medis dengan spesialis penyakit tertentu dan tenaga farmasi yang masih dibutuhkan di Kabupaten Mimika.



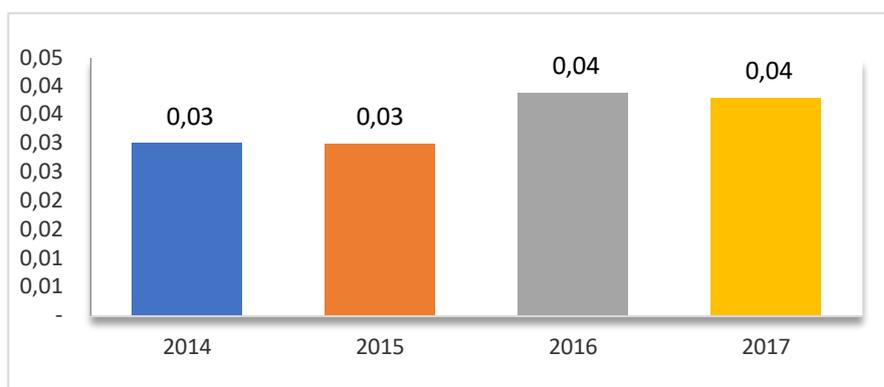
Gambar 3. 17 Rasio Puskesmas dan Pustu di Kabupaten Mimika  
 Sumber : *Diolah, Tahun 2019*



Gambar 3. 18 Rasio Poliklinik di Kabupaten Mimika

Sumber : Diolah, Tahun 2019

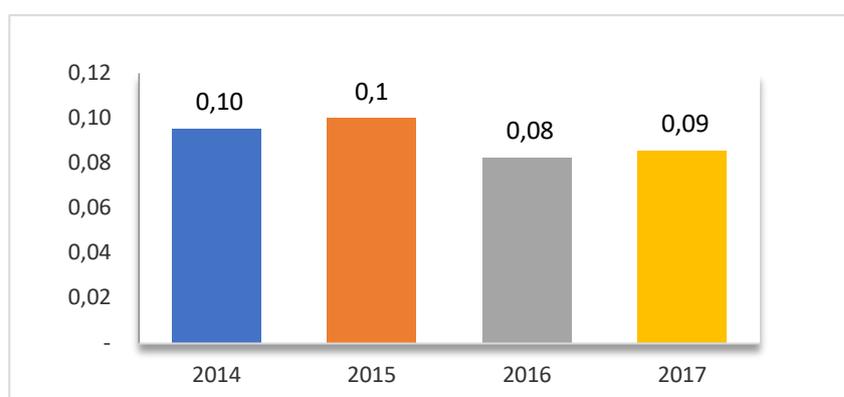
Pada gambar 3.17, dapat dilihat rasio puskesmas dan pusku (puskesmas pembantu) di Kabupaten Mimika mengalami peningkatan, namun hal tersebut cenderung tidak berdampak signifikan dalam artian penambahan jumlah puskesmas tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mimika dimana rasio puskesmas dan pusku per 1000 penduduk pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 0,26 dan pada tahun 2016 hingga 2017 meningkat menjadi sebesar 0,27. Demikian juga dengan rasio poliklinik yang disajikan pada gambar 3.18, dimana terjadi peningkatan dari tahun 2015 ke 2016 menjadi 0,63 namun mengalami penurunan pada tahun 2017. Jika kita melihat angka tersebut maka dibutuhkan peningkatan jumlah puskesmas, pusku dan poliklinik di Kabupaten Mimika yang disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat.



Gambar 3. 19 Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Mimika

Sumber : Diolah, Tahun 2019

Dari gambar 3.19 di atas, dapat dilihat bahwa rasio rumah sakit di Kabupaten masih perlu untuk ditingkatkan. Melihat perkembangan jumlah pertumbuhan penduduk dan persebarannya maka diharapkan ada komitmen dari Kepala Daerah untuk menambah rumah sakit rujukan yang dapat dengan mudah diakses oleh penduduk yang masih berada di distrik atau kampung dengan aksesibilitas dan konektivitas rendah. Dengan demikian dapat menjamin kesehatan masyarakat secara menyeluruh yang merupakan tanggung jawab pemerintah.



Gambar 3. 20 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Sumber : Diolah, Tahun 2019

Dengan melihat grafik 3.20 di atas dapat disimpulkan bahwa rasio dokter per 1000 penduduk mengalami penurunan, dimana peningkatan jumlah penduduk tidak diikuti oleh penambahan jumlah dokter. Dengan demikian diperlukan perhatian khusus untuk penambahan jumlah dokter yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, terutama spesialisasi penyakit tertentu seperti ISPA dan Malaria yang menjadi kebutuhan khusus di Kabupaten Mimika.

#### 3.2.4. Kemampuan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pembanguna suatu daerah, untuk itu, pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah harus disesuaikan dengan rah kebijakan dan strategi-strategi maupun kebijakan daerah dalam

melakukan dan melaksanakan tujuan pembangunannya. Hal ini harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tabel berikut ini dapat dilihat target dan realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Mimika TA. 2018.

Tabel 3. 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.036.960.569.975,00</b>	<b>3.027.516.431.944,93</b>	<b>99,69</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>319.489.197.071,00</b>	<b>342.125.805.715,93</b>	<b>107,09</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	154.814.806.071,00	179.031.188.053,00	115,64
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.677.171.000,00	16.859.971.989,65	90,27
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	2.557.576.204,00	51,15
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.997.220.000,00	143.677.069.469,28	101,90
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.422.579.767.861,00</b>	<b>2.407.000.499.447,00</b>	<b>99,35</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.534.433.885.861,00	1.534.433.885.861,00	100,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	610.285.895.000,00	609.881.657.700,00	99,93
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	277.859.987.000,00	262.684.955.886,00	94,53
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>294.891.605.043,00</b>	<b>278.390.126.782,00</b>	<b>94,40</b>

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.681.690.043,00	35.338.648.730,00	74,11
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	223.426.602.000,00	225.213.993.302,00	100,79
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23.783.313.000,00	17.837.484.750,00	75,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika TA 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan pendapatan sebesar Rp. 3.036.960.569.975,00 dan terealisasi Rp. 3.027.516.431.944,93,- atau sekitar 99,69%. Persentasi Kontribusi Pendapatan Daerah tahun ini terdiri atas pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 319.489.197.071,00 dengan realisasi sebesar Rp. 342.125.805.715,93 atau 107,09%. Untuk Pendapatan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 2.422.579.767.861,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.407.000.499.447,00 atau 99,35%. Sedangkan Komponen Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 278.390.126.782,00 atau 94,40 % dari jumlah yang dianggarkan yakni Rp. 294.891.605.043,00. Jika dilihat dari besarnya kontribusi pendapatan maka kontribusi terbesar adalah dari dana perimbangan dengan realisasi Rp. 2.407.000.499.447,00. Namun dalam data tersebut masih ada beberapa target yang realisasinya belum optimal seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang hanya terealisasi 51,15 % yang masih sangat jauh dari target serta hasil retribusi daerah yang terealisasi sebesar 90,27 % yang seharusnya realisasi tersebut tercapai maksimal karena merupakan pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 3. 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
a.	Belanja Tidak Langsung	1.013.264.534.798,00	933.008.356.655,00	92,07
b.	Belanja Langsung	1.793.853.122.987,00	1.687.710.675.762,00	94,08
	<b>Total</b>	<b>2.807.117.657.785,00</b>	<b>2.620.719.032.417,00</b>	<b>93,35</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2018

Jika merujuk pada table 3.13 maka realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Mimika masih belum mencapai target yang ditentukan, hal ini dapat disimpulkan belum tercapainya tujuan dan sasaran program-program kerja secara efektif dan efisien apabila melihat realisasi belanja tidak langsung sebesar 92,07 persen dan belanja langsung 94,08 persen sehingga total penyerapan belanja daerah hanya tercapai 93,35 persen.

Tabel 3. 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%
1	Belanja Pegawai	607.004.833.000,00	562.912.949.479,00	92,74
2	Belanja Bunga	20.000.000.000,00	11.520.833.338,00	57,60
3	Belanja Subsidi	2.982.000.000,00	2.982.000.000,00	100,00
4	Bantuan Hibah	154.566.879.398,00	133.864.869.712,00	86,61
5	Bantuan Sosial	31.540.415.400,00	30.129.915.400,00	95,53
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	186.670.407.000,00	184.097.788.726,00	97,58
7	Belanja Tidak Terduga	8.500.000.000,00	7.500.000.000,00	88,24
	<b>Total</b>	<b>1.013,264.534.798,00</b>	<b>933.008.356.655,00</b>	<b>92,08</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2018

Tabel 3. 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%
1	Belanja Pegawai	204.819.576.821,00	194.191.180.807,00	94,81
2	Belanja Barang dan Jasa	816.022.386.958,46	754.283.079.355,94	92,41
3	Belanja Modal	773.011.159.208,00	739.236.415.599,00	58,01
	<b>Jumlah</b>	<b>1.793.853.122.987,46</b>	<b>1.687.710.675.761,94</b>	<b>94,08</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2018

Jika kita perhatikan, data pada tabel 3.14 di atas, memperlihatkan bahwa anggaran belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang seharusnya anggaran belanja daerah lebih di prioritaskan pada belanja prioritas percepatan dan pertumbuhan ekonomi serta sektor-sektor pendukung lainnya seperti pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

### **3.3. Isu Strategis dan Prioritas Percepatan Pembangunan Ekonomi**

Berdasarkan hasil analisa data dan fakta, terdapat 3(tiga) isu strategis yang menjadi prioritas pada penyusunan Rencana Percepatan Pembangunan ekonomi (RPPE) Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

#### **3.3.1. Tingginya Jumlah Penduduk Miskin**

Akar permasalahan kemiskinan di Kabupaten Mimika terjadi umumnya disebabkan rendahnya kualitas Pendidikan yang berdampak terhadap kualitas tenaga kerja yang dihasilkan yang berdampak pada permasalahan kemandirian ekonomi masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah dan tanggung jawab semua pihak, untuk itu penurunan jumlah kemiskinan tidak akan mungkin ditangani oleh satu pihak, harus ada sinergitas diantara semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama mencari solusi dan memecahkan permasalahan kemiskinan yang merupakan masalah multifaset dan multidimensi sehingga pemecahan masalah kemiskinan mempunyai kata kunci terwujudnya kerjasama dan sinergitas berbagai pihak. Kemiskinan bukan hanya berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat namun akan berpengaruh pada aspek-aspek lainnya seperti peningkatan gangguan keamanan, penyakit sosial masyarakat (prostitusi, kriminalitas, anak jalanan) serta menurunnya partisipasi sekolah yang berpengaruh pada rendahnya penyerapan tenaga kerja dan secara langsung akan mempengaruhi pada angka Tingkat

Pengangguran Terbuka (TKT), kerusakan lingkungan hidup serta berbagai masalah bawaan lainnya seperti hukum dan politik.

Sebagai masalah multifaset dan multidimensi maka masalah kemiskinan harus diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan yang menyeluruh (holistik) baik dari aspek ekonomi, sosial, politik maupun hukum yang harus dilaksanakan secara serempak dan berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, penanganan masalah kemiskinan dapat dilakukan melalui bantuan–bantuan langsung yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) namun kebijakan ini harus dilakukan dengan selektif dan tepat sasaran sehingga bantuan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat langsung pada rumah tangga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan secara langsung sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya. Secara tidak langsung, penanganan masalah ekonomi dapat dilakukan melalui program maupun kebijakan pembangunan ekonomi seperti melalui pembukaan lapangan kerja ataupun investasi baru dengan demikian akan meningkatkan penawaran terhadap permintaan tenaga kerja baru yang akan berdampak pada peningkatan jumlah penyerapan angkatan kerja dan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TKT) sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin baik.

Kebijakan dan program penanganan masalah kemiskinan yang dipandang berhasil harus terus ditingkatkan dan terus dilanjutkan di masa yang akan datang serta melakukan riset dan pengembangan terkait dengan solusi penanganan kemiskinan di Kabupaten Mimika dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti akademisi, tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan investor maupun pihak-pihak swasta yang sama-sama mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan kemiskinan dan upaya pengentasannya.

### **3.3.2. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi**

Sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Secara normatif, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan terukur melalui laju pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto (PDRB). Untuk itu, pertumbuhan ekonomi lokal harus mempunyai karakteristik dan spesifik agar sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga akan bersifat keberlanjutan dan relevan.

Pertumbuhan ekonomi lokal yang sesuai dengan potensi daerah dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) harus menekankan pada sektor-sektor unggulan misalkan sektor perikanan, pertanian dan juga perkebunan yang dapat dimaksimalkan di Kabupaten Mimika sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan yang menjadikan sektor lainnya tidak menjadi prioritas. Dengan optimalisasi potensi ekonomi non-tambang maka dapat memberikan harapan baru terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika, pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi tersebut dapat membuka lapangan kerja baru serta akses-akses pertumbuhan ekonomi baru.

Optimalisasi dan inovasi produk lokal berbasis riset dan pengembangan juga perlu dilakukan untuk menghasilkan produk lokal yang mempunyai nilai jual dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya di daerah lain yang akan menarik investasi–investasi baru di Kabupaten Mimika sehingga status Kawasan Prioritas Investasi (KPI) di Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi peluang–peluang baru bagi Kabupaten Mimika untuk mempercepat pembangunan ekonominya sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan potensi daerahnya.

### **3.3.3. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dicapai melalui beberapa hal berikut ini.

#### **a. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan dapat dikatakan sebagai subjek maupun objek, peningkatan SDM melalui kualitas pendidikan tentunya mempunyai peranan penting dan strategis dalam tujuan pembangunan daerah. Peran dan kualitas SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah, peningkatan kualitas SDM dapat berpengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, peningkatan investasi dan lain sebagainya. Perencanaan dan pengembangan SDM sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan juga merupakan dasar serta faktor kunci pada tujuan pembangunan daerah. Permasalahan yang seringkali muncul pada bidang pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata serta berkualitas, baik sarana dan prasarana yang berbentuk fisik seperti bangunan sekolah, buku ajar, tempat praktik/laboratorium dan lainnya maupun sarana dan prasarana non fisik seperti kurikulum yang dijalankan, tenaga kependidikan serta metode yang diterapkan pada proses belajar mengajar. Permasalahan tersebut umumnya masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Mimika, kualitas serta tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan menjadikan kualitas pendidikan di Kabupaten Mimika menjadi faktor yang berkontribusi terhadap lambatnya laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika. Selain itu, tidak meratanya sebaran tenaga kependidikan (lebih banyak di kota) menjadikan tidak meratanya kualitas pendidikan antar wilayah di Kabupaten Mimika, hal ini dibutuhkan rangsangan ataupun program stimulus agar tenaga pendidik mau ditempatkan di daerah lainnya (selain di kota) yang membutuhkan tenaga pendidikan.

Lebih lanjut, kurikulum pendidikan tentunya harus lebih menonjolkan muatan-muatan yang mampu meningkatkan life skill maupun soft skill pada peserta didik sehingga dapat merubah kualitas lulusan di Kabupaten Mimika yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja ataupun wirausaha dan tidak lagi terjebak menjadi pencari kerja sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan juga percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kurikulum yang mengadopsi kearifan lokal (local wisdom) perlu dikembangkan yang akan membentuk karakteristik lulusan yang dapat mengembangkan potensi-potensi lokal melalui kreatifitas dan inovasi yang dimilikinya. Selain itu, bangunan sekolah dan juga buku serta laboratorium/ tempat praktik siswa tentunya harus menjadi perhatian utama, dengan peningkatan kualitas fisik dibidang pendidikan maka akan mendukung peningkatan kualitas belajar dan mengajar siswa. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan pun harus diberikan perhatian tentunya melalui pengembangan pendidikannya seperti pemberian beasiswa bagi guru yang akan melanjutkan studi lanjut ke tingkat yang lebih tinggi sehingga akan berdampak pada kualitas pendidikan siswa.

Dalam era disrupsi atau revolusi industri 4.0 saat ini dimana teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan, tidak terlepas bidang pendidikan pun menjadi aspek yang telah banyak berubah saat ini. Digitalisasi dan juga perkembangan teknologi pendidikan saat ini telah menuntut semua pihak yang berkepentingan agar mampu menerapkan perkembangan IPTEK mutakhir dalam bidang pendidikan, artinya penerapan teknologi informasi pendidikan harus menjadi perhatian khusus saat ini untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Mimika, penerapan teknologi Informasi dapat dimulai melalui program seperti E-Learning maupun E-Education yang dapat mendukung pembelajaran siswa mandiri student learning centre

hingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan proses belajar mengajar di wilayah yang mempunyai kekurangan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik, selain itu dengan digitalisasi pendidikan diharapkan mampu membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki IPTEK mutakhir serta berdaya saing tinggi, berwawasan luas dan mempunyai kreatifitas serta kemampuan inovasi yang unggul.

b. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Pada bidang kesehatan, aspek yang menjadi isu utama adalah kualitas pelayanan kesehatan, terjangkau biaya kesehatan dan kecepatan penanganan kesehatan, terutama pelayanan, biaya dan penanganan kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin. Selain permasalahan atau isu tersebut, pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan juga masih menjadi isu yang sampai dengan saat ini terus menjadi masalah di banyak daerah. Dengan demikian, perhatian dan prioritas utama dibidang kesehatan tentunya harus menekankan pada penambahan dan peningkatan sarana dan prasaran kesehatan di wilayah Kabupaten Mimika yang dapat menangani masyarakat di wilayah-wilayah yang masih mempunyai keterbatasan akses dan konektivitas serta pemerataan tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap wilayah. Program stimulus atau yang dapat merangsang pemerataan tenaga kesehatan tentunya harus menjadi perhatian kepala daerah, selain itu penyediaan obat-obatan dan fasilitas kesehatan untuk penanganan pasien gawat darurat tentunya harus disediakan secara merata di tiap wilayah sesuai dengan kondisi wilayahnya, minimal ditiap puskesmas dan puskesmas pembantu ataupun dengan penyediaan puskesmas keliling yang mempunyai jadwal kunjungan tetap ke setiap wilayah dan penguatan serta peningkatan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

Permasalahan pada bidang kesehatan yang menjadi isu adalah perkembangan penyakit menular seperti HIV/AIDS dan juga pemakaian obat-obatan terlarang NAPZA, hal ini tentunya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dikarenakan Kabupaten Mimika masih mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk perkembangan isu tersebut. Selanjutnya permasalahan pada penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan gizi bayi ataupun balita yang disebabkan oleh kurangnya supan makanan bergizi, ketersediaan pangan dan ketidak pahaman orang tua terhadap pola makan bayi dan balita serta faktor sosial ekonomi masyarakat, kurangnya asupan makanan bergizi tentunya dapat menyebabkan permasalahan pada pertumbuhan anak baik secara fisik dan psikologis serta yang paling penting akan berdampak pada kecerdasan anak yang akan mempengaruhi produktifitasnya. Lebih lanjut, permasalahan tersebut juga dapat disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan serta cenderung mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi dan juga kurang memperhatikan kebersihan, dengan demikian perlu diberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang polah hidup sehat dan pemberian asupan makanan dan minuman bergizi untuk bayi ataupun balita guna mendukung kualitas SDM sejak usia balita yang akan berdampak pada kesehatan dan kualitas SDM di masa yang akan datang karena SDM merupakan investasi yang paling penting untuk pembangunan dan kemajuan setiap bangsa di dunia.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana untuk Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Kabupaten Mimika yang menjadi isu utama adalah infrastruktur jalan dengan kondisi baik yang masih kurang sehingga diperlukan perhatian terhadap peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang dapat dilalui oleh kendaraan yang

mempunyai beban tertentu sehingga dapat mendukung percepatan distribusi barang dagang maupun jasa yang akan berdampak pada penyediaan kebutuhan masyarakat dan secara langsung akan berkontribusi pada penurunan angka inflasi. Namun perlu juga ditekankan bahwa peningkatan infrastruktur tidak hanya sebatas pada peningkatan jalan dan jembatan, lebih dari itu untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi suatu daerah maka perlu juga ditingkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi serta bangunan–bangunan yang berfungsi sebagai tempat aktifitas perekonomian masyarakat seperti pembanguna pasar tradisional yang representative serta pusat–pusat perkembangan ekonomi lainnya seperti pusat pengembangan ekonomi kreatif yang akan merangsang sektor–sektor ekonomi baru di Kabupaten Mimika.

Penyediaan teknologi informasi saat ini telah menjadi isu utama dalam berbagai aspek, untuk itu perlu menjadi perhatian terkait teknologi informasi bagi pembangunan ekonomi yang berfungsi sebagai sarana promosi dan penjualan produk lokal dari semua potensi ekonomi yang dimiliki, seperti pariwisata, perikanan, perkebunan, peternakan, pertanian maupun produk lokal lainnya yang dapat memperluas pemasaran maupun penjualan sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan juga pendapatan asli daerah (PAD) non-pertambangan yang menjadi potensi ekonomi lainnya di Kabupaten Mimika.

#### **3.4. POTENSI EKONOMI (NON PERTAMBANGAN) DI KABUPATEN MIMIKA**

Selain pertambangan, potensi ekonomi lainnya di Kabupaten Mimika yang harus menjadi perhatian serta pengelolaan yang optimal adalah perikanan, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang apabila dikelola dengan optimal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Sebagaimana data yang disajikan pada tabel

3.16. ke-3 sektor tersebut merupakan sektor primer yang kontribusinya terus mengalami peningkatan sejak tahun 2013-2016. Berikut data potensi ekonomi non pertambangan di Kabupaten Mimika yang dapat menjadi sektor unggulan lainnya.

### 3.4.1. Pertanian

Luas panen padi sawah di Kabupaten Mimika pada tahun 2013-2015 adalah seluas 1.296 Ha (produksi 4.592 Ton) dengan produktivitas 32,63 Ton/Ha. Berikut adalah data luas panen dan produktivitas padi sawah di distrik Kuala Kencana, Mimika Baru dan Mimika Timur.

Tabel 3. 17 Luas Panen dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Mimika Tahun 2013-2017

Distrik	Luas Penen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
	2013		
Kuala Kencana	25	88	3,52
Mimika Baru	357	1254	3,51
Mimika Timur	24	84	3,50
2014			
Kuala Kencana	89	328	3,69
Mimika Baru	420	1572	3,74
Mimika Timur	31	122	3,94
2015			
Kuala Kencana	25	92	3,68
Mimika Baru	306	979	3,20
Mimika Timur	19	73	3,84
2016			
Iwaka	137	0	0,00
Mimika Baru	0	0	0,00
Mimika Timur	65	0	0,00
2017			
Iwaka	23	0	0,00
Mimika Baru	0	0	0,00
Mimika Timur	2	0	0,00

Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2014-2018, BPS Kabupaten Mimika

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa luas panen padi sawah dan produksinya pada naik pada tahun 2014, namun mengalami penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 penurunannya semakin besar, namun ini perlu diperbarui lagi dari OPD terkait. Distrik Mimika Baru merupakan distrik dengan luas panen dan produktivitas padi sawah paling besar pada tahun 2013-2015, sedangkan tahun 2016-2017 distrik Iwaka merupakan distrik dengan luas panen padi sawah tertinggi.

Tabel 3. 18 Luas Panen dan Produksi Ubi Jalar dan Ubi Kayu Per Distrik Tahun 2018

No	Distrik	Ubi Jalar			Ubi Kayu		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
1.	Mimika Barat	7	38,5	5,5	5	31	6,2
2.	Mimika Barat Tengah	6	39	6,5	6	39	6,5
3.	Mimika Barat Jauh	8	56	5,6	5	38,5	5,5
4.	Mimika Timur	63	378	6	75	420	5,6
5.	Mimika Tengah	8	52	6,5	15	90	6
6.	Mimika Timur Jauh	6	39	6,5	12	78	6,5
7.	Mimika Baru	133	798	6	140	910	6,5
8.	Kuala Kencana	158	1.027	6,5	150	975	6,5
9.	Tembagapura	45	270	6	20	112	5,6
10.	Agimuga	85	544	6,4	90	504	5,6
11.	Jita	60	378	6,3	75	465	6,2
12.	Jila	80	448	5,6	65	364	5,6
13.	Kwamki Narama	150	990	6,6	120	780	6,5
14.	Hoya	30	168	5,6	20	112	5,6
15.	Iwaka	150	975	6,5	140	910	6,5
16.	Wania	123	799,5	6,5	70	420	6
17.	Amar	23	124,2	5,4	15	96	6,4
18.	Alama	40	228	5,7	10	62	6,2
<b>Jumlah</b>		<b>1.175</b>	<b>7.352</b>	<b>6,2</b>	<b>1033</b>	<b>6.407</b>	<b>6.0</b>

Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Mimika

Luas panen Ubi Jalar dan produksi terbesar ada di Distrik Kwamki Narama yaitu 150 Ha dengan jumlah produksi 990 Ton dan Distrik Kuala Kencana yaitu 158 Ha dengan Produksi 1.027 Ton. Sedangkan panen Ubi

Kayu terbesar ada di Distrik Kuala Kencana yaitu 150 Ha dengan produksi terbesarnya 975 ton. Sementara pada tabel 3.18, disajikan data luas panen dan produksi Talas terbesar ada di Distrik Kwamki Narama dan Distrik Kuala Kencana yaitu 160 Ha dengan Produksi 1.040 Ton. Sedangkan panen Keladi terbesar ada di Distrik Iwaka yaitu 130 Ha dengan produksi sebesar 910 ton.

Tabel 3. 19 Luas Panen dan Produksi Rata-rata Produksi Talas dan Keladi Per Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2018

NO	DISTRİK	TALAS			KELADI		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
1.	Mimika Barat	4	26	6,5	3	19,5	6,5
2.	Mimika Barat Tengah	6	39	6,5	5	32,5	6,5
3.	Mimika Barat Jauh	7	45,5	6,5	7	45,5	6,5
4.	Mimika Timur	65	422,5	6,5	75	487,5	6,5
5.	Mimika Tengah	6	39	6,5	10	65	6,5
6.	Mimika Timur Jauh	5	33	6,6	12	72	6
7.	Mimika Baru	150	975	6,5	120	780	6,5
8.	Kuala Kencana	160	1.040	6,5	125	812,5	6,5
9.	Tembagapura	45	261	5,8	25	175	7
10.	Agimuga	75	487,5	6,5	100	630	6,3
11.	Jita	60	378	6,3	75	487,5	6,5
12.	Jila	75	450	6	90	567	6,3
13.	Kwamki Narama	160	1.040	6,5	120	780	6,5
14.	Hoya	35	210	6	20	120	6
15.	Iwaka	115	724,5	6,3	130	910	7
16.	Wania	120	780	6,5	110	715	6,5
17.	Amar	22	140	6,3	20	130	6,5
18.	Alama	35	227,5	6,5	30	195	6,5
<b>Jumlah</b>		<b>1145</b>	<b>7.319</b>	<b>6,3</b>	<b>1077</b>	<b>7.024</b>	<b>6,4</b>

Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Mimika

Dengan demikian, jika melihat data-data yang telah ditampilkan, Kabupaten Mimika mempunyai sektor unggulan daerah lainnya diluar

pertambangan yang sangat berpotensi besar memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian dalam penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk pengelolaan dan optimalisasi sektor ini, serta inovasi produk lokal yang inovatif dan mempunyai nilai jual tinggi.

### 3.4.2. Peternakan

Selain pertanian Kabupaten Mimika juga mempunyai sektor unggulan di bidang peternakan dan telah mempunyai peternak binaan dengan jumlah kurang lebih 3.411 KK yang diprediksi akan terus bertambah sesuai dengan pola perkembangan jumlah hewan ternak seperti ayam, bebek, sapi potong, kambing dan domba dan babi.

Tabel 3. 20 Data Jumlah Peternak Per Desa/Kelurahan dan Distrik Tahun 2018

No	Distrik	Desa/Kelurahan	Jumlah Peternak (KK)
1	Iwaka		373
		Wangirja	45
		Naena Muktipura	86
		Pigapu	25
		Limau Asri Timur	54
		Limau Asri Barat	72
		Iwaka	25
		Mulia kencana	66
2	Kuala Kencana		347
		Utikini Baru	141
		Bhintuka	30
		Mimika Gunung	12
		Karang Senang	39
		Utikini II	70
		Utikini III	55
3	Kwamki Narama		539
		Kelurahan Harapan	105
		Landu Mekar	107
		Amole	88
		Damai	104
		Mikurima	135
4	Mimika Baru		645
		Kebun Sirih	185
		Pasar Sentral	157
		Koperapoka	15
		Hangaitji	56
		Kwamki	44
		Perintis	89
		Timika Jata	99

No	Distrik	Desa/Kelurahan	Jumlah Peternak (KK)
<b>5</b>	<b>Wania</b>		<b>353</b>
		Mandiri Jaya	37
		Nawaripi	88
		Wonosari Jaya	92
		Kamoro Jaya	78
		Mawakau jaya	44
		Inauga	14
<b>6</b>	<b>Mimika Timur</b>		<b>185</b>
		Hiripau	40
		Poumako	1
		Kaugapu	34
		Tipuka	9
		Wania	25
		Muare	76
<b>7</b>	<b>Mimika Tengah</b>		<b>396</b>
		Kamora Miyoko	101
		Aikawapuka	35
		Kekwa	80
		Atuka	106
		Mimika pantai	74
<b>8</b>	<b>Mimika Barat Tengah</b>		<b>341</b>
		Kapiraya	74
		Wumuka	49
		Pronggo	40
		Wakia	34
		Kipiya	92
		Uta	52
<b>9</b>	<b>Agimuga</b>		<b>26</b>
		Kiliarma	3
		Amungun	4
		Aramsulki	4
		Emkomalama	4
		Masimomo	2
		Hinauntung	3
		Fakafuku	2
		Emogoma	4
<b>10</b>	<b>Mimika Barat</b>		<b>93</b>
		Apriuri	21
		Migiwiya	15
		Kokonau	12
		Mimika	26
		Kiyura	13
		Atapo	6
<b>11</b>	<b>Tembagapura</b>		<b>93</b>
		Ombani	12
		Baluni	13
		Jagamin	26
		Ainogin	15
		Angigi	14
		Atapo	13
<b>12</b>	<b>Hoya</b>		<b>20</b>
		Jaba	4
		Kulamagom	4

No	Distrik	Desa/Kelurahan	Jumlah Peternak (KK)
		Jementi	5
		Putih	4
		Jinoni	3
13	Mimika Barat Jauh		Data Belum Terima
14	Mimika Timur Jauh		belum didata
15	Amar		belum didata
16	Alama		belum didata
17	Jita		belum didata
18	Jila		belum didata
	<b>Total</b>		<b>3.411</b>

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Mimika, 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah peternak binaan terbanyak berada di Distrik Mimika Baru sebanyak 645 kk dan Distrik Kwamki Narama sebanyak 539 kk. Pada tabel berikut dapat dilihat data pertumbuhan jumlah populasi berbagai jenis ternak di Kabupaten Mimika Tahun 2014-2017.

Tabel 3. 21 Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Mimika

Jenis Ternak	Jumlah Populasi			
	2014	2015	2016	2017
Babi	14.786	15.021	20.312	27.708
Ayam Buras	64.848	51.505	-	-
Kambing	1.615	1.996	1.900	2.052
Itik	1.604	12.257	29.680	18.491
Sapi	1.353	1.417	1.572	-
Kelinci	970	828	-	-
Bebek	2.018	2.633	-	-
Ayam Potong	32.364	68.735	70.712	80.366
Ayam Petelur	79.951	212.090	208.268	324.865
Kerbau	-	19	19	2
Puyuh	-	7.300	-	-
Kuda	-	-	5	5
Domba	-	-	18	43
Ayam Kampung	-	-	71.599	72.986
Sapi Potong	-	-	603	1.932
<b>Total Populasi</b>	<b>199.509</b>	<b>373.801</b>	<b>404.688</b>	<b>528.450</b>

Sumber: Mimika Dalam Angka Tahun 2015-2018, BPS Kabupaten Mimika

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah populasi ternak terus mengalami peningkatan yang cukup besar. Populasi ternak terbanyak dengan jumlah peningkatan tertinggi adalah unggas jenis ayam petelur dengan jumlah sebanyak 324.865 ekor pada tahun 2017 dan kedua terbanyak adalah ayam potong dengan jumlah populasi 80.366 ekor pada tahun 2017. Untuk jenis ternak besar, babi menempati urutan teratas dengan jumlah populasi 27.708 ekor pada tahun 2017 dan sapi potong sebanyak 1.932 ekor.

Dengan demikian apabila sektor peternakan ini terus dikembangkan akan memberikan kontribusi yang besar bagi daerah, terutama di distrik-distrik seperti Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Iwaka yang memberikan kontribusi terbesar untuk sektor ini. Perlu diberikan pembinaan dan peningkatan kualitas pada peternak terkait dengan pola ternak serta produksi olahan dari jenis-jenis ternak tertentu yang mempunyai nilai jual dan nilai tawar yang tinggi sehingga sektor peternakan mempunyai pola pengelolaan berkelanjutan dan produk olahan ataupun hasil pemotongan hewan ternak yang bisa dijual keluar daerah.

#### **3.4.3. Perikanan dan Kelautan**

Pada sektor perikanan dan kelautan, Kabupaten Mimika juga mempunyai potensi yang sangat tinggi apabila mampu dimanfaatkan secara optimal. Pelarangan dan penghadangan terhadap penangkapan ikan secara illegal oleh kapal-kapal asing menjadikan perikanan dan kelautan Mimika berangsur-angsur pulih kembali dan memberikan hasil tangkapan yang baik kepada nelayan setempat.

Pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Mimika difokuskan pada jenis udang, kakap dan kepiting (karaka). Ketiga jenis komoditas tersebut merupakan produk unggulan yang mempunyai nilai jual tinggi dan telah mempunyai pasaran yang tetap keluar wilayah seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali dan ke luar negeri seperti

Australia dan Singapura. Pada tabel berikut dapat dilihat data perikanan darat dan laut di Kabupaten Mimika Tahun 2014 – 2018.

Tabel 3. 22 Data Produksi Perikanan Tangkap Di Kabupaten Mimika Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	Produksi Perikanan Tangkap	
		Perairan Laut (Ton)	Perairan Umum (Ton)
1	2014	8.069,09	600,00
2	2015	8.305,20	670,00
3	2016	6.529,00	763,00
4	2017	5.375,75	2.265,00
5	2018	6.757,50	1.052,50
<b>Jumlah</b>		<b>35.036,54</b>	<b>5.350,5</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, Tahun 2018

Pada tabel 3.16 di atas dapat dilihat bahwa produksi perikanan laut di kabupaten Mimika cukup tinggi. Namun berbeda dengan produksi perikanan budidaya yang menunjukkan penurunan pada tahun 2018, dimana penurunan tersebut setengahnya dari total produksi tahun 2017 sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 23 Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015-2018

No	Komoditi	Produksi			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				
	Ikan Mas	-	-	0,305	-
	Ikan Nila	-	-	1,78	3.650
	Ikan Lele	40.000	-	51,78	41
	DII	-	-	0,93	1
2	Jumlah Produksi Benih (Ekor)				
	Balai Benih Ikan Lokal (Ekor)	-	-	-	-
	Ikan Mas	-	10.300	10.300	-
	Ikan Nila	-	5.000	5.000	30.039
	Ikan Lele	-	300	300	789
3	Pembudidaya (Ekor)				
	Ikan Mas	-	10.000	522.500	-
	Ikan Nila	-	5.000	133.900	98.403
	Ikan Lele	404.000	366.500	368.175	454.301
	DII	-	-	32.000	4.000

No	Komoditi	Produksi			
		2015	2016	2017	2018
	Jumlah	444.000	397.100	1.072.175	591.224

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, Tahun 2018

Potensi dan produksi perikanan tidak hanya difokuskan pada jenis dan jumlah tangkapan saja, namun sampai pada produk lainnya yang bernilai jual tinggi seperti sirip hiu, gelembung dan fillet kakap. Jika dilihat pada tabel berikut, produksi per bulan dari masing-masing belum menunjukkan angka meningkat atau pun menurun. Hal ini menunjukkan produksinya masih belum stabil.

Tabel 3. 24 Rekap Komoditi Olahan yang Keluar Tahun 2018

No	Nama	Bulan												Jmlh/ Thn
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Sirip hiu				648	805	142	41	197	177	292	126	227	2.655
2	Gelembung	609	493	967	6.278	392	232	442	592	349	1.864	1.741	1.172	15.130
3	Fillet Kakap		3.448			181.470		1.938			1.677			188.533

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, Tahun 2018

Potensi dan produksi perairan tangkap seperti udang, kakap, dan kepiting merupakan jenis hasil tangkapan (*target species*) nelayan yang paling dominan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Mimika.

Tabel 3. 25 Rekap Komoditi Udang dan Kepiting yang Keluar Tahun 2018

No	Nama	BULAN												Jml/ Thn
		JAN	FEB	MART	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Banana	13.069	12.558	8.803	8.935	1.811	732	3.423	17.674	107.288	110.427	52.525	45.333	<b>382.578</b>
2	Tiger	1.440	1.684	511	6.551	542	235	1.285	971	4.057	3.759	-	145	<b>21.180</b>
3	Galah	676	1.595	538	120	30	-	-	-	-	913	3.297	-	<b>7.169</b>
4	Lobster	2	-	30	-	-	-	-	-	-	100	110	-	<b>242</b>
5	Kepiting	112.735	132.670	98.059	81.885	88.254	78.748	67.873	54.352	58.005	72.310	45.442	34.898	<b>925.231</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, Tahun 2018

Berdasarkan data-data perikanan dan kelautan yang disajikan pada tabel-tabel di atas, potensi yang dimiliki Kabupaten Mimika sangat menjanjikan. Untuk itu perlu adanya strategi-strategi pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada sektor perikanan dan kelautan

seperti peningkatan dan perluasan komoditi yang dapat diekspor maupun peningkatan dan perluasan komoditi yang dapat dikirim keluar daerah (Nasional). Selain itu, pembinaan terhadap nelayan juga perlu dilakukan dengan men-sosialisasikan alat dan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian pesisir dan laut Kabupaten Mimika.

### 3.5. Sasaran Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE)

Sesuai dengan isu strategis dan prioritas serta potensi pada Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Kabupaten Mimika maka dapat ditetapkan beberapa sasaran percepatan pembangunan guna mendukung Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) di Kabupaten Mimika dan menjadi acuan pada penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika dengan isu strategis dan sasaran sebagai berikut.

Tabel 3. 26 Isu Strategis dan Sasaran RPPE di Kabupaten Mimika

No	Isu Strategis	Sasaran
1	Penurunan Kemiskinan Angka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkurangnya angka kemiskinan baik rumah tangga maupun individu minimal mencapai target Nasional pada setiap tahunnya sehingga akan tercapai zero poverty pada tahun 2030 sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)</li> <li>- Terdapat data pasti tentang perkembangan angka kemiskinan (by name / by address) sehingga arah kebijakan menjadi tepat sasaran</li> </ul>
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan inovasi produk lokal sesuai dengan unggulan bapak asuh bagi pelaku ekonomi masyarakat</li> <li>- Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor unggulan (non pertambangan) terhadap PDRB</li> <li>- Meningkatnya peran koperasi dan UMKM</li> </ul>

No	Isu Strategis	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif guna mendorong kontribusi kearifan lokal pada PDRB</li> </ul>
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meratanya kualitas pendidikan di setiap wilayah untuk menekan disparitas kualitas pendidikan dan lulusan</li> <li>- Terciptanya inovasi di bidang pendidikan melalui E-Learning dan E-Education sebagai solusi alternatif dan pengembangan model pembelajaran di era revolusi industri 4.0</li> <li>- Meningkatnya angka partisipasi wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat</li> <li>- Meningkatnya kualitas pendidikan dan tingkatan jenjang pendidikan masyarakat</li> <li>- Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan bagi Guru</li> </ul>
4	Peningkatan Kualitas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas pelayanan dan penanganan kesehatan bagi masyarakat (terutama masyarakat miskin)</li> <li>- Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan</li> <li>- Meratanya fasilitas kesehatan di setiap wilayah</li> <li>- Meratanya tenaga kesehatan dan juga obat – obatan di setiap wilayah</li> <li>- Meningkatnya teknologi informasi dan juga peralatan kesehatan</li> <li>- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat dan menjaga kesehatan ibu, bayi dan anak</li> <li>- Berkurangnya penularan penyakit berbahaya (HIV/AIDS) dan juga penyalahgunaan obat terlarang (NAPZA).</li> </ul>
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung perekonomian</li> <li>- Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>- Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>- Meningkatnya sarana dan prasarana ruang publik ramah anak</li> <li>- Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih</li> </ul>

No	Isu Strategis	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pasokan listrik pada sektor RT</li> <li>- Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan</li> <li>- Meningkatnya teknologi dan informasi pendukung percepatan pembangunan ekonomi</li> </ul>
6	Pemanfaatan Potensi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB</li> <li>- Meningkatnya jumlah ekspor komoditas unggulan daerah</li> <li>- Optimalnya pengelolaan sektor unggulan daerah non pertambangan</li> <li>- Meluasnya pasar distribusi dan penjualan komoditas unggulan</li> <li>- Tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru berbasis masyarakat dan kearifan lokal</li> <li>- Meningkatnya kualitas SDM pelaku ekonomi</li> <li>- Meningkatnya kualitas teknologi pengolahan komoditas unggulan</li> <li>- Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan daerah</li> </ul>

Sumber: Diolah, 2019

### 3.5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk menjawab isu–isu strategis pada Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) di Kabupaten Mimika, perlu disusun strategi dan arah kebijakan yang dapat diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB). Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan yang dapat diselaraskan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 27 Strategi dan Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Di Kabupaten Mimika

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Penurunan Angka Kemiskinan	- Mengurangi beban masyarakat miskin	- Peningkatan sarana dan prasarana

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		Rumah Tangga maupun individu dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar;	<p>pendukung pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat kategori miskin seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, sosial dan pemukiman yang layak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian pendidikan dan pelatihan baik soft skill maupun life skill serta pendampingan pasca diklat dengan melibatkan semua pihak</li> <li>- Pemberian modal usaha dan penyediaan lapangan usaha baru berbasis masyarakat</li> </ul>
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan area pertumbuhan ekonomi baru berbasis masyarakat, kearifan lokal.</li> <li>- Perluasan akses permodalan, investasi, penjualan dan pemasaran bagi usaha masyarakat.</li> <li>- Menumbuhkan dan memperkuat peran koperasi dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong inovasi produk lokal berbasis masyarakat dan kearifan lokal</li> <li>- Menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan pemerintah baik lintas regional maupun nasional untuk pemasaran produk masyarakat serta transfer knowledge melalui studi banding</li> <li>- Membentuk kelompok –kelompok usaha masyarakat (KUM)</li> <li>- Memberikan dana usaha bergulir bagi kelompok – kelompok usaha masyarakat melalui kopersu usaha bersama (KUB).</li> </ul>

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan dan mengembangkan pariwisata daerah berbasis riset dan pengembangan dengan melibatkan semua pihak untuk melakukan promosi pariwisata daerah</li> <li>- Menumbuhkan dan membina kreatifitas dan inovasi SDM masyarakat untuk memfasilitasi dan mempromosikan ekonomi kreatif berbasis masyarakat</li> <li>- Membentuk pusat pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai potensi ekonomi baru</li> <li>- Meningkatkan investasi terhadap teknologi pengelolaan komoditas daerah seperti peternakan, pertanian dan perikanan agar dapat menciptakan produk olahan dari komoditas unggulan</li> <li>- Membina dan memfasilitasi wirausaha – wirausaha baru dengan cara memberikan akses permodalan dan pemasaran dengan</li> </ul>

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan inovasi dan promosi produk lokal</li> </ul>	<p>melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk akademisi dan para pelaku usaha di Kabupaten Mimika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan daya saing melalui inovasi dan kreatifitas produk lokal seperti kuliner khas daerah dan mempromosikannya secara berkala baik melalui kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan maupun kegiatan-kegiatan lainnya oleh pihak non pemerintahan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media promosi</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan tenaga pendidikan.</li> <li>- Penguatan aksesibilitas, sarana dan prasarana pendidikan.</li> <li>- Penguatan teknologi informasi pendidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemerataan tenaga pendidikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan wilayah</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>- Meningkatkan penguasaan teknologi dan informasi pendidikan baik kepada tenaga pendidik maupun</li> </ul>

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan.</li> <li>- Pencanaan wajib belajar 12 tahun bagi usia sekolah.</li> <li>- Penguatan dan pengembangan peran Lembaga-Lembaga masyarakat</li> </ul>	<p>siswa untuk mengikuti perkembangan IPTEK mutakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan melalui bantuan beasiswa studi lanjut dengan ikatan dan perjanjian kerja</li> <li>- Mengembangkan program pendidikan 12 tahun serta mendorong dunia pendidikan agar meningkatkan model pendidikan berbasis outcome kejuruan dan keterampilan yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha</li> <li>- Meningkatkan dan memperluas peran LSM dibidang pendidikan untuk memperkuat kelas-kelas belajar mandiri berbasis masyarakat yang dapat membina dan membuka akses pendidikan ke seluruh wilayah</li> </ul>
4	Peningkatan Kualitas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan kesehatan secara</li> </ul>

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan</li> </ul>	<p>proporsional, menyediakan fasilitas kesehatan memadai di setiap puskesmas dan puskesmas pembantu atau puskesmas keliling serta melakukan pemerataan posisi tenaga kesehatan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan wilayahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembinaan dan penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat melalui pos yandu ataupun Lembaga masyarakat yang bertanggung jawab dan mempunyai kepedulian akan kesehatan masyarakat</li> <li>- Meminimalisir resiko penyakit menular (HIV/AIDS) ataupun penyakit lainnya dan penyalahgunaan obat terlarang NAPZA dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama</li> <li>- Meningkatkan kualitas sanitasi dan teknologi informasi</li> </ul>

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
			dibidang kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian.</li>   <li>- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pendidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pasar tradisional</li> <li>- Mengembangkan pusat pengembangan produk lokal dan ekonomi kreatif</li> <li>- Mengembangkan dan memaksimalkan pusat kajian dan pengembangan ekonomi yang melibatkan semua pihak baik akademisi, masyarakat maupun pihak lainnya</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas teknologi yang tepat guna untuk pengembangan produk lokal</li> <li>- Membangun pusat pendidikan dan pelatihan wirausaha masyarakat</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna memperluas aksesibilitas dan konektivitas melalui peningkatan kualitas</li> </ul>

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Kesehatan.</li> </ul>	<p>dan kuantitas jalan / jembatan yang dapat meningkatkan kualitas distribusi perekonomian antar wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sarana dan prasarana bagi potensi ekonomi baru</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar berbasis masyarakat</li> <li>- Membangun perpustakaan – perpustakaan kampung untuk menumbuhkan minat literasi dasar bagi anak usia sekolah</li> <li>- Penyediaan perpustakaan keliling yang difasilitasi teknologi dan informasi pendidikan seperti e-book, e-learning dan e-education</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemukiman bagi tenaga pendidik</li> <li>- Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berbasis masyarakat sebagai media informasi dan sosialisasi kesehatan</li> </ul>

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		- Peningkatan sarana dan prasarana potensi ekonomi baru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas puskesmas keliling yang difasilitasi teknologi dan informasi kesehatan mutakhir</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemukiman bagi tenaga kesehatan dan didukung oleh teknologi komunikasi yang baik</li> <li>- Menyediakan sarana dan prasarana bagi potensi ekonomi baru sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah</li> <li>- meningkatkan investasi pada teknologi informasi sebagai sarana produksi dan promosi daerah untuk pengembangan ekonomi baru</li> </ul>

Sumber: Diolah, 2019

### 3.5.2. Sasaran dan Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023

Program dan kegiatan pada Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Kabupaten Mimika yang dapat diselaraskan dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang direkomendasikan sebagai berikut.

Tabel 3. 28 Sasaran dan Program Pada Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023

No	Sasaran	Program
1	<p>Meningkatkan akselerasi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi masyarakat pedalaman dan pesisir</p> <p>Mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Lembaga ekonomi pedesaan</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, pelaku UMKM, ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan, pemasaran dan produksi dan promosi</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan teknologi informasi pendukung usaha / ekonomi masyarakat</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan manajemen koperasi</li> <li>- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</li> <li>- Kerjasama informasi dengan media masa</li> </ul>
2	<p>Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan dan Pemanfaatan pekarangan rumah masyarakat sebagai Kawasan ketahanan pangan rumah tangga</li> <li>- Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui pelatihan usaha pangan lokal</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan teknologi pengolahan pangan</li> <li>- Pengembangan kawasan mandiri pangan melalui pembinaan, pendampingan dan bantuan sosial</li> <li>- Membentuk Lembaga Ketahanan Pangan Distrik (LKPD) sebagai penanggung jawab ketahanan pangan wilayah distrik</li> <li>- Inovasi dan kreasi pangan melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan</li> </ul>

No	Sasaran	Program
		menciptakan pangan yang beragam dan bergizi
3	<p>Penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial</p> <p>Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat</p> <p>Meningkatnya kesempatan kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan modal sosial (social capital) dan modal manusia (human capital) melalui peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta kearifan local</li> <li>- Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan</li> <li>- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat keluarga</li> <li>- Bantuan sosial dan bantuan permodalan bagi usaha rumah tangga.</li> <li>- Membentuk kelompok – kelompok usaha bersama distrik (KUBD)</li> <li>- Mengembangkan koperasi usaha bersama dan memberikan bantuan dana bergulir bagi usaha-usaha produktif</li> <li>- Peningkatan kesejahteraan petani</li> </ul>
4	<p>Peningkatan Kualitas pendidikan dan Belajar Mengajar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar berbasis outcomes (dampak kualitas lulusan)</li> <li>- Peningkatan metode pembelajaran dan kurikulum lulusan berbasis life skills dan soft skills</li> <li>- Peningkatan kualitas belajar mengajar melalui teknologi dan informasi pendidikan</li> <li>- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya</li> <li>- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>- Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>- Pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah dan bantuan pendidikan bagi keluarga miskin</li> <li>- Pendidikan Non Formal</li> <li>- Pendidikan Tinggi</li> </ul>

No	Sasaran	Program
5	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan gizi masyarakat melalui bantuan makanan dan minuman pendamping ASI bagi balita</li> <li>- Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan menyusui</li> <li>- Penyuluhan kesehatan pada masyarakat yang melibatkan Lembaga – Lembaga masyarakat, akademisi dan stakeholder lainnya</li> <li>- Pengadaan dan pemerataan obat – obatan dan perbekalan kesehatan serta fasilitas kesehatan lainnya</li> <li>- Peningkatan teknologi informasi kesehatan</li> </ul>
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman, perhubungan dan penunjang perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jalan dan jembatan</li> <li>- Pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>- Peningkatan/pembangunan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</li> <li>- Pembangunan saluran drainase</li> <li>- Pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> <li>- Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumnuh</li> <li>- Sanitasi Perdesaan</li> <li>- Pengendalian Banjir</li> <li>- Pengelolaan RTH</li> <li>- Pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>- Pembangunan Gedung Pusat Riset dan Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata Daerah</li> <li>- Pembangunan Gedung Pusat Kreatifitas Kabupaten Mimika (Mimika Creativity Centre)</li> <li>- Peningkatan teknologi informasi sebagai sarana promosi daerah</li> </ul>
7	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (non pertambangan)  Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan ketahanan pangan</li> <li>- Peningkatan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan</li> <li>- Penerapan teknologi pengelolaan pertanian, peternakan dan perikanan</li> </ul>

No	Sasaran	Program
	Meningkatnya daya saing perekonomian berbasis sektor unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri</li> <li>- Inovasi pengolahan komoditas menjadi produk unggulan berbasis riset dan pengembangan</li> <li>- Pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kualitas petani, peternak dan nelayan</li> <li>- Pengembangan koperasi usaha bersama untuk petani, peternak dan nelayan</li> <li>- Bantuan dana bergulir bagi petani, peternak dan nelayan produktif</li> <li>- Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan</li> <li>- Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan</li> <li>- Pengembangan budidaya perikanan</li> <li>- Pengembangan Kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar</li> <li>- Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan</li> <li>- Pengembangan industry pengolahahn hasil perikanan</li> <li>- Pengembangan perikanan tangkap</li> <li>- Pengembangan informasi dan promosi perikanan tangkap</li> <li>- Perlindungan dan pengendalian usaha perikanan tangkap</li> </ul>

Sumber: Diolah, 2019

## BAB IV ANALISIS CAPAIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pencapaian percepatan pembangunan ekonomi dapat ditetapkan dengan mengacu pada isu–isu strategis yang bersifat prioritas yaitu penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut.

### 1. Penurunan Angka Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan dapat mengacu pada target pencapaian Nasional yaitu sebesar 7 persen pada tahun 2024, dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan setiap tahunnya yang saat ini masih berada pada angka 14,55 persen dan pada tahun 2025 diharapkan turun menjadi 12,86 persen dengan asumsi rata – rata pencapaian penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen setiap tahunnya yang dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Target Capaian Penurunan Angka Kemiskinan  
Tahun 2020 - 2025

No	Target Capaian Penurunan Angka Kemiskinan (persen)							
	Tahun	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Asumsi Penurunan	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Status Angka Kemiskinan	14,55	14,25	13,96	13,68	13,40	13,13	12,86

*Sumber : Data diolah Tahun 2019*

Dengan asumsi penurunan angka kemiskinan rata – rata sebesar 2 persen setiap tahunnya yang dimulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, maka angka kemiskinan di Kabupaten Mimika dapat ditekan menjadi 12,86 pada tahun 2025, memang angka ini masih

jauh dari target pencapaian Nasional, namun upaya-upaya ini harus terus dilakukan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah, jika asumsi penurunan angka lebih dari 2 persen, maka penurunan angka kemiskinan akan lebih cepat, begitupun sebaliknya jika asumsi persentase penurunan setiap tahunnya lebih lambat, maka penurunan angka kemiskinan akan lebih lambat dan bahkan akan meningkat. Dengan demikian, target yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu tanpa kemiskinan pada tahun 2030 akan lebih cepat tercapai di Kabupaten Mimika apabila Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga mendapat dukungan pendanaan baik dari APBN, APBD, Swasta maupun masyarakat dan adanya sinergitas dan sinkronisasi dari semua pihak.

## **2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Selain penurunan angka kemiskinan, indicator yang menjadi isu prioritas didalam Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) di Kabupaten Mimika adalah Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana lainnya. Meskipun Kabupaten Mimika setiap tahunnya mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusiannya (IPM) namun sampai dengan saat ini laju pertumbuhannya masih terkesan lambat dengan nilai rata-rata 0,78 persen dalam setiap tahunnya, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dan arah kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan IPM Kabupaten Mimika yang dapat diselaraskan dengan kemampuan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Analisis capaian peningkatan IPM di Kabupaten Mimika dapat ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Analisis Target Capaian Peningkatan IPM Tahun 2020 - 2025

No	Target Capaian Pertumbuhan IPM Tahun 2020-2025							
	Tahun	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Asumsi Pertumbuhan		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2	Status Angka IPM	73,15	74,24	75,35	76,48	77,62	78,78	79,96

Sumber : Data Diolah Tahun 2019

Dengan asumsi pertumbuhan sebesar 1,50 persen per tahunnya, maka diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika akan terus meningkat hingga pada tahun 2025 akan berada pada angka 79,96. Meskipun demikian asumsi pertumbuhan dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah, jika asumsinya lebih tinggi dari 1,50 persen maka pertumbuhan akan lebih cepat, demikian juga sebaliknya jika asumsi angka pertumbuhan lebih rendah maka laju pertumbuhan akan lebih lambat.

Dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika, maka dapat berpengaruh pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta peningkatan penyerapan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja baru yang akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.

### 3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Non Tambang

Kabupaten Mimika memiliki potensi untuk pengembangan perekonomian sektor wilayah (non pertambangan) atau sektor primer lainnya seperti sektor perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan yang jika arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Mimika mampu menggali potensi yang ada maka akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB Kabupaten Mimika. Berdasarkan PDRB tahun 2013-2016, sektor perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya (tabel 3.6). dengan demikian, dampak lebih jauh dari sektor tersebut diharapkan dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja baru yang akan

berdampak pada penurunan angka kemiskinan serta Tingkat Penganggura Terbuka (TPT) di Kabupaten Mimika.

# BAB V PENDANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

## 5.1. PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023 dapat dilaksanakan melalui sumber-sumber pendanaan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  
Kegiatan–kegiatan yang relevan yang tertuang dalam Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) dapat dimasukkan dalam komponen – komponen pembiayaan APBN seperti bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (sarana dan prasarana).
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Percepatan pembangunan ekonomi seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab atas pendanaan kegiatan–kegiatan yang mendukung Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) baik melalui APBD Provinsi maupun melalui APBD Kabupaten.
3. Pihak Swasta dan Masyarakat  
Dukungan pihak swasta dan masyarakat akan memberikan kontribusi pada percepatan pembangunan ekonomi, untuk itu pemerintah daerah harus menggandeng pihak swasta dan masyarakat (LSM) maupun individu dan tokoh-tokoh untuk bersama–sama mendukung Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) melalui dukungan pendanaan maupun material lainnya seperti lahan ataupun gedung bangunan.

#### 4. Sumber Pendanaan Lainnya

Pemerintah Daerah agar dapat menggali sumber-sumber pendanaan lainnya diluar mekanisme pendanaan APBN, APBD seperti pendanaan yang bersumber dari *Coorporate Social Responsibility* (CSR) ataupun filantropi yang diberikan yang sesuai dengan perundang-undangan.

### 5.2. Pelaksanaan

Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) di Kabupaten Mimika yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan optimal dan tepat sasaran jika adanya sinergitas dan sinkronisasi dari semua pihak melalui koordinasi dan regulasi. Pemerintah Daerah Kabupate Mimika diharapkan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) untuk melaksanakan Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu:

1. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten / Kota.
2. Adanya keberpihakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) serta meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya.
3. Untuk menjamin Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) tepat sasaran, maka Kepala Daerah (Bupati) harus melakukan:
  - Sinkronisasi dan sinergitas Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) ini dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan

menetapkan Rencana Aksi Daerah yang mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

- Meningkatkan harmonisasi hubungan kerja baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan *stakeholder* guna meningkatkan dukungan pendanaan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program percepatan pembangunan ekonomi yang mewajibkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan secara berkala proses dan hasilnya untuk dievaluasi.
- Bersama Gubernur mengkoordinasikan arah kebijakan Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) melalui penyusunan perencanaan – perencanaan pembangunan.

### **5.3. Pengawasan dan Evaluasi**

Sebagai bentuk dukungan dan keberpihakan Kepala Daerah terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika maka Bupati harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian kinerja melalui indikator kinerja utama percepatan pembangunan ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi sesuai dengan rencana jangka waktu yang ditetapkan;
2. Pengawasan dan evaluasi dilakukan terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE);
3. Pengawasan dan evaluasi mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah.

## **BAB VI PENUTUP**

Penyusunan dokumen Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023 sangat penting dilakukan sebagai acuan dasar menetapkan sasaran, strategi dan program-program prioritas untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Untuk mengimplementasikan Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023 diperlukan dukungan seluruh pihak dan pelaku pembangunan dalam pelaksanaannya baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Akademisi, Organisasi ataupun Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, pihak swasta dan masyarakat secara keseluruhan.

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Mimika akan tercapai apabila adanya sinergitas dan sinkronisasi semua pihak serta terlaksananya *Good and Clean Governance* serta komitmen semua pihak.

Dokumen Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi (RPPE) Kabupaten Mimika Tahun 2019-2023 ini memang masih jauh dari sempurna, untuk itu masih diperlukan saran dan masukan dari semua pihak untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar percepatan pembangunan ekonomi dapat tercapai dengan cepat dan tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Jln. Cenderawasih SP.2 Timika - Papua

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR : 09 TAHUN 2019

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN DATA PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN  
SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL (P2SED T)

Lampiran : 1 (satu)

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Data Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED T) Tahun Anggaran 2019, perlu dibentuk Tim Penyusun ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabuputen-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135,tambahan Lembaran Negara 4151);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
5. Perturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategis Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2015-2019.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika;
10. Peraturan Bupati Mimika Nomor 01 Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Panitia Khusus dan Tim Penyusun Dokumen Data Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Tahun Anggaran 2019 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas :
1. Melakukan analisis data terkait percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika ;
  2. Menyusun Dokumen Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi ( RPPE ) di Kabupaten Mimika ;
  3. Mempresentasikan Dokumen Rencana Percepatan Pembangunan Ekonomi ( RPPE ) di Kabupaten Mimika.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika, pada SKPD Bappeda Kabupaten Mimika, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Kegiatan Penyusunan Data Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Tahun Anggaran 2019 DPA Nomor 4.03 01 22 19 5 2
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Timika  
 Pada Tanggal : 20 AGUSTUS 2019


  
**BAPPEDA KAB. MIMIKA**  
**Pjh, K E P A L A,**  
  
**Dis. MARTHEN PAIDING, ST, M.Si**  
 PEMRINTA I TAMA M I M I K A

Lampiran : Keputusan Plh Kepala Bappeda Kab. Mimika  
Nomor : Tahun 2019  
Tanggal : 20 Agustus 2019

**SUSUNAN NAMA-NAMA  
TIM PANITIA KHUSUS DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN  
KEGIATAN PENYUSUNAN DATA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAERAH  
TERTINGGAL (P2SED)  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**A. TIM PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN DATA PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL (P2SED)**

1. KETUA : WINNY. D.A MATULESSY, S.STP. M.SI  
2. SEKRETARIS : IRAWATI SUAT, SE  
3. ANGGOTA : 1. OKTOVIANUS DOGOPIA, SE, MH  
2. GERARDUS PSAKOR, SE  
3. SURYA WAHYUNI, ST  
4. NOPRIAN THAMRIN, S. SI  
5. ALLOYSIUS YOHANIS SETITIT, S. Sos  
6. BASTIAN YANPIET BLESS, S. Sos  
7. ESTRI PERTIWI KUSUMAWARDANI, S. Si  
8. WENSESLAUS TAKATI, SE  
9. FRANSISCA ISTIANY ISTIA  
10. ARYANTO OHOINER  
11. PRIMUS STEVEN WAMUNI  
12. AGUSTINUS TAMATANI  
13. MUSLIHAN IKWANI  
14. LUSIA NOVITA BOKEYAU, S.IP  
15. NIKO KANUNGGOK, SH

**B. TIM PENYUSUN DOKUMEN PENYUSUNAN DATA PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL (P2SED)**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KEAHLIAN/KEILMUAN
1	Dr. Andri Irawan, SE, M.Si	Ketua	Pengembangan SDM, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2	Dr. Abdul Rasyid, SE, M.Si	Anggota	Ekonomi Pembangunan Dan Manajemen Keuangan Daerah.
3	Dr. Entar Sutisman , SE,M.Si	Anggota	Akuntansi dan Manajemen Keuangan Publik.
4	Irwan Adam Labo, SE, M.Si	Anggota	Manajemen Keuangan Daerah.